

**ANALISA KONSEP SDGs DAN DANA DESA DALAM  
PENTAHHELIX SYSTEM UNTUK MEMPENGARUHI  
PERKEMBANGAN EKONOMI DI WILAYAH PANTAI  
TIMUR PROVINSI SUMATERA UTARA  
(Studi Kasus : Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



**Oleh:**

**Nama** : RIZANA RIZKI AMALIA NASUTION  
**NPM** : 1805180016  
**Program Studi** : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Srata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama Lengkap : RIZANA RIZKI AMALIA NASUTION  
NPM : 1805180016  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Konsentrasi : RISET EKONOMI DAN BISNIS  
Judul Skripsi : ANALISA KONSEP SDGs DAN DANA DESA DALAM PENTAHHELIX SYSTEM UNTUK MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN EKONOMI DI WIYAH PANTAI TIMUR PROVINSI SUATERA UTARA (Studi Kasus : Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara)

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

Dra. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

Penguji II

HASTINA FEBRIATY, S.E., M.Si

Pembimbing

Dra. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : RIZANA RIZKI AMALIA NASUTION

NPM : 1805180016

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

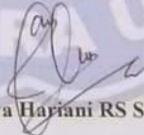
Konsentrasi : RISET EKONOMI DAN BISNIS

Judul Skripsi : ANALISA KONSEP SDGs DAN DANA DESA DALAM  
PENTAHELIX SYSTEM UNTUK MEMPENGARUHI  
PERKEMBANGAN EKONOMI DI WILAYAH PANTAI TIMUR  
PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS: KABUPATEN  
ASAHAN DAN KABUPATEN BATU BARA)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2022

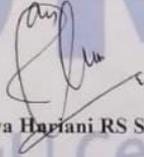
Pembimbing Skripsi

  
(Dr. Prawidya Harjani RS S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(Dr. Prawidya Harjani RS S.E., M.Si.)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : RIZANA RIZKI AMALIA NASUTION  
NPM : 1805180016  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Alamat Rumah : JL. AMPERA VII NO.2  
Judul Skripsi : ANALISIS KONSEP SDGs DAN DANA DESA DALAM PENTHAHELIX SYSTEM UNTUK MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN EKONOMI DI WILAYAH PANTAI TIMUR PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS KABUPATEN ASAHAN DAN KABUPATEN BATUBARA)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
11/Jul-2022	- melengkapi data - melengkapi lagi penelitian terdahulu		
25/Jul-2022	- abstraknya - menganalisis pentahelix system - gambaran umum		
3/Agustus-2022	- kondisi ekonomi - indikator sosial		
10/Agustus-2022	indeks Desa Membangun (IDM)		
14/Agustus-2022	Kuesioner		
28/Agustus-2022	Telah selesai dikerjakan dan ACC disetujui untuk sidang skripsi		

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Medan, September 2022

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

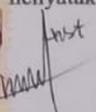
Nama : RIZANA RIZKI AMALIA NASUTION  
Npm : 1805180016  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Riset Ekonomi Dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **ANALISA KONSEP SDGs DAN DANA DESA DALAM PENTAHELIX SYSTEM UNTUK MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN EKONOMI DI WILAYAH PANTAI TIMUR PROVINSI SUMATERA UTARA (Studi Kasus : Kabupaten Ashan dan Kabupaten Batu Bara)**” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, September 2022

menyatakan  
  
RIZANA RIZKI AMALIA NASUTION

## ABSTRAK

### “Analisa Konsep SDGs Dan Dana Desa Dalam Pentahelix System Untuk Mempengaruhi Perkembangan Ekonomi Di Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara (Studi Kasus: Kabupaten Asahan Dan Kabupaten Batu Bara)”

RIZANA RIZKI AMALIA NASUTION ( 1805180016 )

Ekonomi Pembangunan

Email : [rizanasution22@gmail.com](mailto:rizanasution22@gmail.com)

Dalam skripsi ini diangkat berdasarkan fenomena yang terjadi dalam laporan tahunan perekonomian Indonesia bahwasanya tidak meratanya pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan sehingga tidak meratanya perekonomian yang terjadi antara Wilayah pantai Barat Provinsi Sumatera Utara dengan Wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara. Seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Dana Desa adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan serta untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tujuan penggunaan dana desa di dalamnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam konsep *Pentahelix system* adalah sebuah model inovatif pengembangan dari model *quadrupehelix* yang menghubungkan dengan Akademisi, Bisnis, Komunitas, pemerintah, dan Media untuk menciptakan ekosistem berdasarkan kreatifitas dan pengetahuan, dimana yang diharapkan dari konsep ini adalah sebuah solusi untuk pengembangan kreatifitas, inovasi dan teknologi pada industry kreatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pentingnya *pentahelix system* dalam rangka pengelolaan dana desa di 5 desa kabupaten batu bara. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Non-probability sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 15 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari hasil penyebaran angket (kuesioner) dan data skunder yang berumber dari lembaga pengumpulan data Badan Pusat statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan metode analisa faktor.

Berdasarkan hasil uji analisis faktor, variabel informasi tentang *pentahelix system* dan variabel berkolaborasi dengan unsur-unsur *pentahelix system* & variabel faktor pengetahuan tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap faktor pemerintahan desa terhadap *pentahelix system* di wilayah pantai timur provinsi sumatera utara kabupaten Batu Bara.

**Kata Kunci:** *SDGs, Dana Desa, dan Pentahelix System*

## ABSTRACT

*"Analysis of the Concept of SDGs and Village Funds in the Pentahelix System to Influence Economic Development in the East Coast Region of North Sumatra (Case Study: Asahan Regency and Batu Bara Regency)"*

**RIZANA RIZKI AMALIA NASUTION ( 1805180016 )**

development economics

Email : [rizanasution22@gmail.com](mailto:rizanasution22@gmail.com)

In this thesis, it is raised based on the phenomenon that occurs in the annual report of the Indonesian economy that there is uneven economic development in rural areas so that the economic unevenness that occurs between the West coast region of North Sumatra Province and the East Coast Region of North Sumatra Province. How much influence the Human Development Index has on the Village Fund is one of the efforts made by the government to alleviate poverty and to prosper the Indonesian people. The purpose of using village funds in it is to finance the administration of government, the implementation of development, community development and community empowerment in the concept of Pentahelix system is an innovative model of development of the quadruphelix model that connects with Academics, Business, Community, government, and media to create an ecosystem based on creativity and knowledge, where what is expected of this concept is a solution for the development of creativity, innovation and technology in the creative industry.

This research aims to analyze what factors influence the importance of the pentahelix system in the context of managing village funds in 5 coal district villages. The sampling technique used the Non-probability sampling method and obtained a sample of 15 respondents. The type of data used is primary data sourced from the results of the distribution of questionnaires (questionnaires) and skunder data from data collection agencies of the Central Statistics Agency (BPS). This research uses a factor analysis method.

Based on the results of the factor analysis test, the variable information about the pentahelix system and the variables collaborated with the elements of the pentahelix system & the knowledge factor variable had no influence and significant influence on the village government factor on the pentahelix system in the east coast of the north sumatra province of Batu Bara regency.

**Keywords:** *SDGs, Village Fund, and Pentahelix System*

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas nikmat kesehatan, kesempatan, dan diberikan-Nya kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Shalawat beriring salam tak lupa penulis hadiahkan pada jungjungan Rasulullah Muhammad SAW, semoga syafaat beliau tercurah bagi penulis dan pembaca sekalian.

Penelitian ini merupakan kewajiban bagi penulis sebagai seorang mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini. Selain itu, penulis juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun judul penelitian yang penulis buat yaitu: : **“Analisa Konsep SDGs dan Dana Desa Dalam Pentahelix System Untuk Mempengaruhi Perkembangan Ekonomi Di Wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus: Kabupaten Asahan Dan Kabupaten Batu Bara) ”**. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi dan juga semangat dari berbagai pihak yang ada sehingga dapat membuat penulis Semangat, tekun serta giat dalam menyusun dan menyelesaikan

skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan segalanya yang telah diberikan berbagai pihak tersebut terutama kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada penulis. Dan atas izinNya Yang memberikan kesempatan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Teristimewa untuk kedua orangtua, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Syahrizal Nasution dan Ibunda Inna Handayani serta Adik Tasyari Ramadani Nasution yang selalu hadir dengan cinta, doa dan merupakan kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus belajar dan tetap kuat ketika menghadapi situasi tersulit sekalipun.
3. Bapak Dr. H Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januari, S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Dr. Prawidya Hariyani RS, selaku ketua Proram Studi Ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan/arahan/masukan serta kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
6. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

7. Seluruh dosen mata kuliah Prodi Ekonomi Pembangunan Falkutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada sahabat seperjuangan saya, Siti Khopipah, Dara Rezeki, Salsabilla Raihan Dolay, Fildzah Syafira Al-hamid, M. Fariz Al Azhari Rokan, yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan masukan kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan UMSU 2018 yang tidak dapat saya sebutkn satu per satu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada diriku sendiri, terima kasih karena masih bertahan sampai sejauh ini.
11. Seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu demi satu. Seluruh bantuan yang tidak ternilai harganya ini tidak dapat saya balas satu per satu, semoga Allah SWT membalasnya sebagai amal ibadah dan akan menjadi manfaat yang sangat besar bagi kita semua, Amin.

Penulis menyadari bahwasanya didalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna oleh sebab itu penulis dengan segala kerendahan hati memohon kepada semua pihak untuk dapat memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis agar kedepannya penulisan skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, atas semua bimbingan, bantuan, motivasi serta seluruh yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dengan sebagaimana mestinya. Penulis

tidak dapat membalas segala kebaikan yang telah didapat namun penulis mendoakan semoga ALLAH SWT. Memberikan balasan imbalan pahala dan diberikan rezeki berlipat ganda serta dimudahkan dalam segala urusannya. Pada akhirnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan berharap semoga penulisan skripsi ini dapat penulis lanjutkan hingga akhirnya selesai dan memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, September 2022

Penulis,

**Rizana Rizki Amalia Naution**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	39
1.3 Batasan Masalah.....	40
1.4 Rumusan Masalah.....	41
1.5 Tujuan Penelitian .....	41
1.6 Manfaat Penelitian.....	41
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>43</b>
2.1 Landasan Teori.....	43
2.1.1 Pembangunan Ekonomi .....	43
2.1.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi Klasik.....	45
2.1.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis .....	47
2.1.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi Aliran Keynesian.....	47
2.1.1.4 Teori Pembangunan Ekonomi Neo-Klasik .....	49
2.1.2 Kebijakan Fiskal.....	51
2.1.2.1 Tujuan Kebijakan Fiskal.....	52
2.1.2.2 Jenis-jenis Kebijakan Fiskal .....	53
2.1.2.3 Indikator Kebijakan Fiskal.....	55
2.1.3 Teori Pengeluaran Negara .....	56
2.1.3.1 Musgrave dan Rostow .....	57
2.1.3.2 Wagner.....	57
2.1.3.3 Peacock dan Wiseman .....	58
2.1.4 Pentahelix .....	63
2.1.4.1 Pengertian <i>Pentahelix</i> .....	63

2.1.4.2 Sejarah Perkembangan <i>Pentahelix</i> .....	64
2.1.4.3 Triple Helix .....	64
2.2 Penelitian Terdahulu .....	67
2.2.1 Kebijakan Dana Desa.....	68
2.2.1.1 Mekanisme Penyaluran Dana Desa .....	69
2.2.1.2 Penggunaan Dana Desa .....	71
2.2.2 Desentralisasi Fiskal .....	74
2.3 Kerangka Penelitian.....	76
2.3.1 Kerangka Konseptual Penelitian .....	76
2.3.2 Kerangka Model Analisa Faktor.....	77
<b>BAB III.....</b>	<b>78</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>78</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	78
3.2 Definisi Operasional .....	78
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	80
3.3.1 Tempat penelitian.....	80
3.3.2 Waktu Penelitian .....	80
3.4 jenis dan Sumber Data .....	80
3.4.1 Jenis Data.....	80
3.4.2 Sumber Data .....	81
3.5 Populasi dan Sampel.....	81
3.5.1 Populasi .....	81
3.5.2 Sampel .....	81
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	83
3.7 Teknik Analisis Tujuan Penelitian .....	83
3.7.1 Analisis Ekonomi Deskriptif Perkembangan Indikator Sosial Dan Ekonomi Pada Kabupaten Asahan, dan Batu Bara.....	83
3.7.2 Melakukan Analisa Ekonomi Secara Deskriptif Tentang Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Pada Kabupaten Asahan Dan Batu Bara.....	84
3.7.3 Model Analisis Faktor .....	84
<b>BAB IV .....</b>	<b>87</b>
<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>87</b>
4.1 . Gambaran Umum Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara .....	87

4.1.1. Kondisi Geografis .....	87
4.1.1.1 Letak .....	87
4.1.1.2. Topografis .....	90
4.1.1.3. Iklim .....	90
4.1.2. Kondisi Demografis di Wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara .....	91
4.1.2.1. Jumlah Penduduk .....	91
4.1.2.2. Tenaga Kerja .....	92
4.1.3. Kondisi Ekonomi .....	93
4.1.4 Kondisi Sosial.....	96
4.1.4.1 Kemiskinan .....	96
4.1.4.2 Pendidikan.....	97
4.1.4.3 Kesehatan.....	99
4.2. Melakukan Analisa Ekonomi Secara Deskriptif Tentang Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Di Kabupaten Asahan Dan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 - 2021 .....	102
4.3. Analisa Faktor .....	107
4.3.1. Melakukan Analisa Faktor Yang Memengaruhi Pentingnya <i>Pentahelix System</i> Dalam Rangka Pengelolaan Dana Desa.....	107
4.3.1.1. Deskriptif Data Responden.....	107
4.3.2. Hasil Penelitian Analisa SEM-PLS .....	109
4.3.2.1. Convergent Validity .....	109
4.3.2.2. Discriminante validity .....	117
4.3.2.3. Composite Reliability.....	118
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>122</b>
5.1. Kesimpulan .....	122
5.2. Saran .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>128</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah dan Peresentase Penduduk Miskin Menurut daerah, September 2020-September 2021 .....	11
Tabel 1.2 Perbandingan APBN 2020 dan APBN 2021 .....	25
Tabel 1.3 Rincian Dana Desa Menurut Provinsi/Kabupaten di Indonesia Tahun 2021.....	32
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	67
Tabel 3.1 Definisi Oprasional.....	78
Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kabupaten Di Wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara.....	86
Tabel 4.2 Tinggi Wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021....	87
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	89
Tabel 4.4 Jumlah Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas.....	89
Tabel 4.5 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Belaku Dan Harga Konstan.....	90
Tabel 4.6 Struktur Ekonomi PDRB Lapangan Usaha.....	92
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Miskin.....	94
Tabel 4.8 Indek Pembangunan Manusia (IPM).....	101
Tabel 4.9 Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Asaha.....	104
Tabel 4.10 Nilai Indeks Desa Membangun Kabuaten Batu Bara.....	105
Tabel 4.11 Converagent Validity Faktor Pemeritahan Desa Terhadap Pentahelix System.....	110
Tabel 4.12 Converagent Validity Informasi Tentang Pentahelix System.....	111
Tabel 4.13 Converagent Validity Berkolaborasi Dengan Unsur-Unsur Pentahelix System.....	111
Tabel 4.14 Converagent Validity Faktor Pengetahuan.....	112
Tabel 4.15 Converagent Validity Faktor Pemerintahan Desa Terhadap Pentahelix System.....	114
Tabel 4.16 Converagent Validity Faktor Informasi Tentang Pentahelix System	115
Tabel 4.17 Converagent Validity Berkolaborasi Dengan Unsur-Unsur Pentahelix System.....	116
Tabel 4.14 Converagent Validity Faktor Pengetahuan.....	116
Tabel 4.19 Discriminante Validity Pada Avarage Extracted (AVE).....	117
Tabel 4.20 Composite Reliability.....	118
Tabel 4.21 R-Square.....	119
Tabel 4.22 Uji Hipotesis.....	119

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021.....	5
Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2010- 2021.....	8
Gambar 1.3 Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Maret 2011 –September 2021.....	10
Gambar 1.4 Grafik Perkembangan Gini Ratio, September 2015–September 2021 .....	12
Gambar 1.5 Model <i>Pentahelix</i> .....	21
Gambar 1.6 Grafik Perbandingan Transfer ke Daerah Tahun 2005 - 2016.....	30
Gambar 1.7 Grafik Transfer Ke Daerah dan Dana Desa .....	31
Gambar 1.8 Grafik Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Pulau Sumatera,2018 ...	34
Gambar 1.9 Grafik IPD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara, 2018.....	35
Gambar 1.10 Grafik rata-rata IDM di Indonesia Provinsi, 2019.....	37
Gambar 1.11 Grafik Perkembangan Pembangunan Desa Menurut Status IDM ...	38
Gambar 2.1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah .....	58
Gambar 2.2 Kurva Peacock dan Wiseman.....	59
Gambar 2.3 Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave.....	60
Gambar 2.4 Kerangka Konseptual.....	76
Gambar 2.5 Bagan Kerangka Model Analisa faktor.....	77
Gambar 4.1 Peta Wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara.....	85
Gambar 4.2 Grafik Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas di Kabupaten Asahan Tahun 2021.....	97
Gambar 4.3 Grafik Perkembangan HLS dan RLS Kabupaten Batu Bara, 2017-2021.....	98
Gambar 4.4 Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup Di Kabupaten Asahan Tahun 2017-2021.....	99
Gambar 4.5 Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup Batu Bara, 2017-2021.....	100
Gambar 4.6 Usia Responden.....	107
Gambar 4.7 Jenis Kelamin Responden.....	108
Gambar 4.8 Jabatan Responden.....	109
Gambar 4.9 First Outer Loading.....	113
Gambar 4.10 Second Outer Loading.....	114

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional, tujuan utama pembangunan ekonomi yaitu untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya pada suatu negara. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi pertumbuhan dari berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Pertumbuhan suatu negara dapat dilihat dari perkembangan dunia usaha yang ada di negara tersebut, Indonesia memiliki berbagai macam industri, baik bersekala kecil maupun besar. Pada situasi perekonomian di Indonesia sekarang ini membawa dampak persaingan yang semakin ketat di berbagai bidang industri. Oleh karena itu perusahaan harus dapat bersaing dalam bidang industrinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan yaitu dengan meningkatkan kemampuan internalnya seperti meningkatkan teknologi, kualitas produk, kualitas sumber daya manusia, maupun kinerja perusahaan yang semakin baik.

Realita pembangunan ekonomi Indonesia, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, maka posisinya Indonesia digolongkan sebagai negara berkembang. Sebagai negara berkembang Indonesia dianggap negara yang memiliki tingkat kemakmuran yang masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara maju. Potensi sumber alam negeri ini dapat dilihat meliputi bidang agraris dan maritim Indonesia boleh dikatakan negeri yang kaya raya. Meskipun dari sisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masih jauh dibawah negara-negara maju. Indonesia juga banyak memiliki potensi ekonomi yang mulai

diperhatikan dunia internasional. Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan penghapusan kemiskinan. Beberapa negara tuan tersebut akan menjadi sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan atau mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan (Deninger & Pedro 2000)

Salah satu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan hasil pembangunan menjadi sasaran yang utama. Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang dialami dunia semenjak dua abad belakangan ini. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. (Todaro & Smith, 2017).

Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga dialami Indonesia yang pada triwulan III tahun 2021 tumbuh 3,5 persen (y on y). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan pada seluruh kelompok pengeluaran, terutama net ekspor yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Meningkatnya net ekspor sejalan dengan kinerja perdagangan internasional Indonesia yang tumbuh impresif sepanjang triwulan III tahun 2021, didorong oleh peningkatan permintaan dari negara mitra dagang serta peningkatan harga

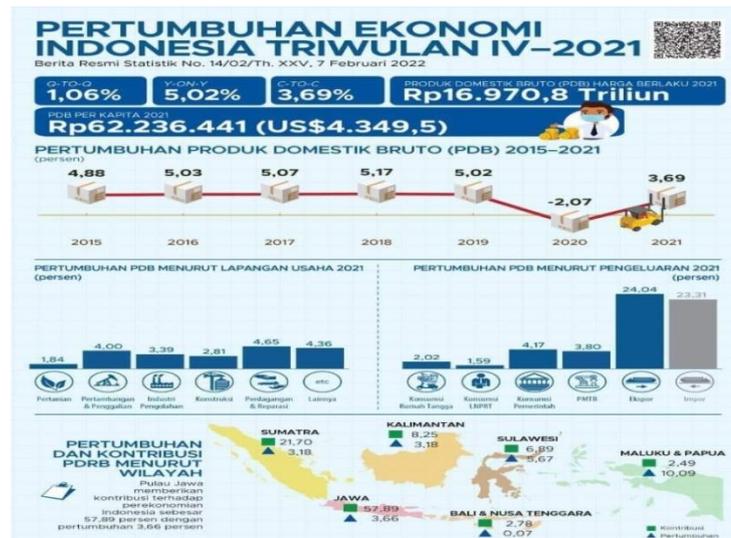
56 komoditas global. Selain itu, juga dipengaruhi oleh pertumbuhan investasi sebesar 3,7 persen (y on y), sejalan dengan peningkatan aktivitas industri yang mendorong pembelian barang modal. Sementara dari sisi sektoral, lima sektor berkontraksi ditengah berlanjutnya kinerja positif di sebagian besar sektor. Sektor akomodasi dan makan minum serta sektor transportasi dan perdagangan adalah sebagian sektor yang mengalami kontraksi, dampak dari PPKM Darurat yang diberlakukan di berbagai daerah. Sementara itu, dari sebagian besar sektor yang masih tumbuh positif, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang dipengaruhi oleh penanganan pasien Covid-19 yang kembali mengalami lonjakan.

Perkembangan kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali dengan peningkatan baik pada pendapatan negara, realisasi belanja negara, maupun pembiayaan. Pendapatan negara dan hibah meningkat 16,8 persen (y on y) menjadi sebesar Rp1.354,8 triliun atau mencapai 77,7 persen dari target APBN 2021. Kinerja tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan, dan PNBPN namun tertahan oleh hibah yang berkontraksi cukup dalam. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.806,8 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 65,7 persen dari APBN sementara TKDD mencapai 68,1 persen. Realisasi TKDD pada triwulan III tahun 2021 lebih rendah 14,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh kontraksi yang terjadi pada realisasi DBH dan DAK Fisik akibat persyaratan yang belum dapat dipenuhi sehingga menghambat penyaluran. Berdasarkan capaian tersebut, defisit anggaran hingga September 2021 sebesar Rp452,0 triliun atau

sekitar 2,7 persen terhadap PDB. Dengan perkembangan tersebut, posisi utang pemerintah mencapai Rp6,711,5 triliun atau sebesar 41,4 persen terhadap PDB.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang dialami dunia semenjak dua abad belakangan ini dari satu periode ke periode lain. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dengan berbagai proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. (Todaro & Smith, 2017)

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap negara, termasuk negara Indonesia. Karena, tanpa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi peningkatan ekonomi kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan. Negara juga dapat dikatakan sejahtera jika output perkapita meningkat. Dalam literatur ekonomi makro, tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan PDB per kapita. Makin tinggi PDB per kapita, makin sejahtera masyarakat. Agar PDB perkapita terus meningkat maka perekonomian harus terus tumbuh dan harus lebih tinggi dari pada penambahan penduduk.



**Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021**

Sumber: Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y on y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,83 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,06 persen (q to q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan,

dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,20 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,00 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89 persen dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen. Pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2021 tumbuh sebesar -0,71 persen, naik dibandingkan dengan trimulan IV-2021 sebesar -2,19 persen. Hal ini terjadi karena pengaruh Pandemi COVID-19 gelombang kedua mencetuskan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pada trimulan ke II 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin naik sebesar 7,07 persen, hal ini disebabkan dampak Pandemi COVID-19 sudah berkurang sangat banyak. Pada perekonomian trimulan ke III-2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun sebesar 3,51 persen, hal ini menunjukkan bahwa dampak Pandemi COVID-19 naik lagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi di triwulan II sebesar 7,07% (y on y) membaik dari pertumbuhan trimulan ke III sebesar 3,51 (y on y). Struktur perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,89 persen pada tahun 2021 triwulan IV, Pulau Sumatera sebesar 21,70 persen, Pulau Kalimantan sebesar 8,25 persen, Pulau Sulawesi sebesar 6,89 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,78 persen, dan Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,49 persen. Pandemi COVID-19 gelombang kedua mencetuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama triwulan III 2021 yang berdampak pada melambatnya

pertumbuhan ekonomi di sejumlah kelompok pulau. Pertumbuhan ekonomi (y on y) kelompok provinsi menurut pulau secara berturut-turut yaitu Pulau Maluku dan Papua tumbuh sebesar 9,15 persen, Pulau Sulawesi 4,58 persen, Pulau Kalimantan 4,52 persen, Pulau Sumatera 3,78 persen, dan Pulau Jawa 3,03 persen. Sementara itu, kelompok provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,09 persen.

Pertumbuhan yang tinggi belum tentu menjamin bahwa ketidak merataan distribusi pendapatan akan rendah. Karena pertumbuhan ekonomi bisa saja dikatakan pertumbuhan yang semu. Hal ini ditandai dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia meski pertumbuhan PDB dikatakan bagus. Masalahnya kemiskinan sudah sejak lama menjadi masalah bangsa Indonesia, dan hingga sekarang masalah tersebut belum menunjukkan tanda-tanda menghilang. Angka statistik terus memberikan informasi yang banyaknya penduduk miskin di Indonesia (Suliswanto,2010).

Salah satu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan hasil pembangunan menjadi sasaran yang utama. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi menyebabkan ketimpangan pembangunan pada setiap daerah. Ketimpangan pembangunan seringkali menjadi permasalahan serius dan jika tidak dapat diatasi secara hati-hati akan menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan juga dalam konteks makro dapat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah.

Wilayah maju terus meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor non unggulan yang membebani (Andhiani, Erfit, & Bhakti, 2018).

Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur bagaimana otonomi daerah dengan mekanisme transfer ke daerah dan dana desa dikelola baik untuk kesejahteraan masyarakat dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh UNDP (United Nations Development Programme) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (Human Development Report). IPM adalah pengukuran perbandingan dari Kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak untuk semua negara/wilayah di seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara atau wilayah adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.



**Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2010-2021**

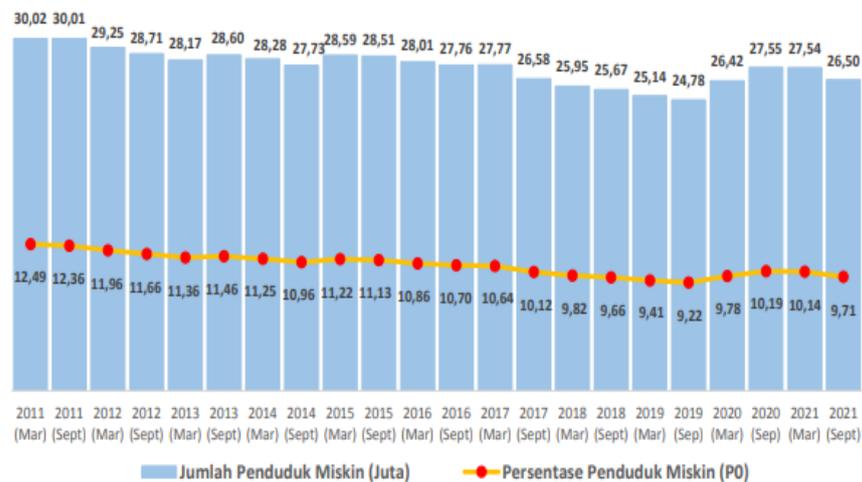
Sumber: Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan. Pada 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 1,30 persen. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 13,08 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,10 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,98 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,06 tahun, dari 8,48 tahun menjadi 8,54 tahun pada tahun 2021. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,57 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Sehingga dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata (Arifianto & Setiyono, 2013).

Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktifitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. (Kurniawan, 2009)

Melihat dari sejarah, tingkat kemiskinan perdesaan selalu lebih tinggi dibanding perkotaan sejak 1993. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi kemiskinan perdesaan saat itu mencapai 13,8 persen dari populasi sementara perkotaan hanya 13,4 persen. Meningkatnya industrialisasi yang banyak menciptakan lapangan kerja di kota-kota besar membuat angka kemiskinan.



**Gambar 1.3 Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Maret 2011 –September 2021**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Secara umum, pada periode Maret 2011–September 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan

pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2011 sampai dengan September 2021. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 mencapai 26,50 juta orang. Dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun 1,04 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,05 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020.

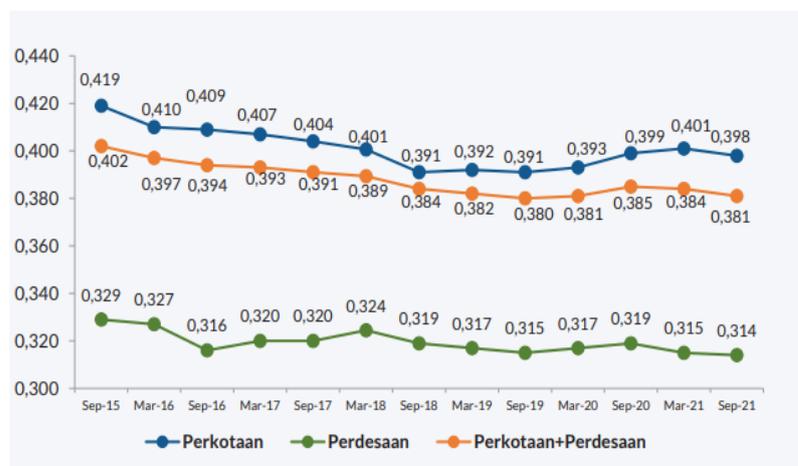
**Tabel 1.1**

**Jumlah dan Peresentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2020 -September 2021**

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	Peresentase Penduduk Miskin
1	2	3
<b>Perkotaan</b>		
September, 2020	12,04	7,88
Maret, 2021	12,18	7,89
September, 2021	11,86	7,60
<b>Perdesaan</b>		
September, 2020	15,51	13,20
Maret, 2021	15,37	13,10
September, 2021	14,64	12,53
<b>Total</b>		
September, 2020	27,55	10,19
Maret, 2021	27,54	10,14
September, 2021	26,50	9,71

Sumber:Badan Pusat Statistik (BPS) ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Pada Pemerintahan Presiden Jokowi JK, pembangunan memfokuskan dalam pembangunan daerah pinggiran desa. Mendorong pembangunan desa untuk selalu melakukan inovasi dan terus melakukan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Jumlah dana transfer ke desa diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar pedesaan dan perkotaan. Namun permasalahan yang kita lihat yaitu kesenjangan sosial ekonomi, kemiskinan, tingkat stress tinggi, penyalahgunaan lahan, pencemaran lingkungan, tingkat kesadaran masyarakat rendah, pelanggaran hukum, dan masih banyak anak putus sekolah. Untuk itu pemerintah mau melihat semua orang bisa mengatasi masalah tersebut, maka pondasi pemerintahan harus menyatu, membawa tata kelola yang baik hingga ke tingkat kabupaten bahkan pedesaan. Tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: penemuan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.



**Gambar 1.4 Grafik Perkembangan Gini Ratio, September 2015–September 2021**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Secara nasional, sejak September 2015 angka Gini Ratio mengalami penurunan sampai dengan September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Namun demikian, akibat adanya pandemi Covid-19, nilai Gini Ratio kembali mengalami kenaikan pada Maret 2020 dan September 2020 lalu kembali mengalami penurunan pada Maret 2021.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 adalah sebesar 0,398. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,003 poin dibanding Maret 2021 yang sebesar 0,401 dan menurun sebesar 0,001 poin dibanding September 2020 yang sebesar 0,399. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada September 2021 tercatat sebesar 0,314; turun sebesar 0,001 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 dan sebesar 0,005 poin dibandingkan dengan kondisi September 2020. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2021 dan September 2020 masing-masing tercatat sebesar 0,315 dan 0,319.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional dikenal dengan adanya Trilogi Pembangunan yang memiliki 3 unsur yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dalam melaksanakan kebijaksanaan Trirogi pembangunan itu kita harus metihat ketiga unsur Trilogi pembangunan tersebut saling mengkait dan dikembangkan secara selaras, terpadu dan saling memperkuat. Dengan pertumbuhan ekonomi justru kita dapat melaksanakan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan,

dan memang pertumbuhan ekonomi juga diarahkan untuk pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan akan mendukung pertumbuhan ekonomi karena akan lebih besar potensi yang mendorong pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi kita tidak akan dapat melaksanakan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. *Millenium Development Goals* (MDGs) hadir yang telah disetujui oleh 189 anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) pada bulan September 2000. MDGs merupakan paling kuat yang menunjukkan komitmen internasional untuk kemiskinan global.

menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; mencapai pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; memastikan kelestarian lingkungan hidup; serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Tujuan – tujuan tersebut dicanangkan secara khusus untuk dicapai pada tahun 2015. (Todaro & Smith, 2011)

Pada tanggal 25 September 2015, PBB melakukan perubahan dari Tujuan Pembangunan *Milenium* atau *Millennium Development Goals* (MDGs) menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. SDGs terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun

2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi ([www.id.undp.org](http://www.id.undp.org))

Agenda 2030 terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs) atau Tujuan Global, yang akan menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan, yang dimulai dengan pernyataan bersejarah untuk mengakhiri kemiskinan di semua tempat secara permanen. Adapun 17 tujuan SDGs yaitu:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (*No Poverty*).
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan (*Zero Hunger*).
3. Menjamin hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia (*Good Healt and Well Being*).
4. Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup (*Quality Education*).
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan (*Gender Equality*).
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (*Clean Water and Sanitation*).
7. Memastikan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua (*Affordable and Clean Energy*).
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan keberlanjutan lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (*Decent Work and Economic Growth*).

9. Membangun infrastruktur yang tahan banting, mendorong industrialisasi yang inklusif dan keberlanjutan, serta mendorong inovasi (*Industry, Innovation, and Infrastructure*).
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara (*Reduced Inequalities*).
11. Menjadikan kota dan pemukiman aman, tangguh, inklusif, dan keberlanjutan (*Sustainable Cities and Communities*).
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (*Responsible Consumption and Production*).
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya (*Climate Action*).
14. Melestarikan dan secara berkelanjutan menggunakan samudra, laut, dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan (*Life Below Water*).
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan penggunaan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi pengundulan gunung, dan menghentikan serta mengembalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati (*Life On Land*).
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan (*Peace, Justice and Strong Institutions*).
17. Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (*Partnership for The Goals*).

Kekuatan pengembangan potensi Desa dan kawasan perdesaan perlu didukung oleh semua unsur. Pengembangan potensi Desa dan Kawasan Perdesaan tak bisa dilakukan satu unsur saja. Komitmen dan sinergi antar unsur satu dengan unsur lainnya menjadi kunci utama. Maka konsep Pentahelix atau disebut Multipihak dimana unsur Pemerintah, Akademisi, badan atau Pelaku Usaha, Masyarakat atau Komunitas, dan Media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan potensi lokal Desa dan kawasan perdesaan. Potensi lokal Desa dan kawasan perdesaan yang tetap mengedepankan kearifan lokal dan bersumber daya lokal.

Pemerataan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka upaya penguatan ketahanan ekonomi masyarakat Desa untuk menemukan pola kemitraan dalam pengembangan potensi Desa dan Kawasan Perdesaan yaitu dengan melibatkan Multipihak (*Pentahelix*). Sejumlah topik dibahas dalam rakor tersebut dimana pokok pembahasan terkait dengan implementasi *Integrated Farming System* untuk menggerakkan ekonomi Desa dan Kawasan Perdesaan serta pola kemitraan multipihak. ([www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id)).

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam bahasa kerennya Sustainable Development Goals (SDGs).

SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Mengutip dari Permendesda 13/2020 setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, yaitu :

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Melalui pola kemitraan yang diharapkan dapat mewujudkan SDG's Desa dalam mencapai percepatan pemulihan ekonomi Desa, ketahanan pangan dan

energi, kesejahteraan, serta stabilitas keamanan. Konsep pentahelix pada awalnya digunakan untuk mengatasi tantangan *global warning* yang telah terjadi dengan menerapkan ilmu pengetahuan yang berfokus pada perubahan sosial dan ilmu pengetahuan di negara-negara tertentu. Konsep ini dikemukakan oleh Carayannis dan Campbell (2010) yang memberikan penjelasan bawah konsep *Quintuple Helix* merupakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dengan mengedepankan *eco-innovation* dan *eco-entrepreneurship* melalui kerja sama antar sektor. *Quintuple Helix* tidak muncul begitu saja. Terjadi perkembangan dalam menyempurnakan konsep ini. Mulai dari *Triple Helix*, *Quadruple Helix*, sehingga kemudian lahir lah konsep *Quintuple Helix*. namun terdapat perbedaan pada aktor-aktornya. Aktor pada konsep *Quintuple Helix* terdiri dari akademik perguruan tinggi, industri, pemerintah, media dan publik, dan sumber daya alam (Carayannis & Campbell, 2010).

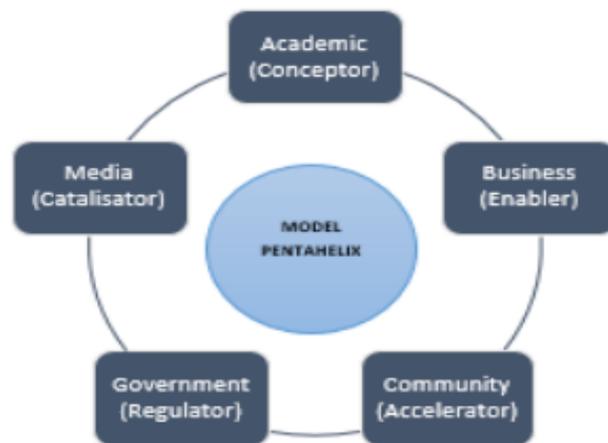
Sebelum lahirnya model pentahelix, ada model yang telah dikembangkan yakni Model triplehelix dimana model ini sebelumnya merupakan rekomendasi dalam mengembangkan ekonomi, namun karena persaingan pasar yang lebih kompetitif dan bertujuan mengembangkan perusahaan dan ekspor ke pasar dunia maka lahirlah model terbarunya yakni quadruplehelix dimana merupakan rekomendasi untuk kemakmuran perusahaan (Veckie, 2015). Model quadruplehelix adalah hasil pengembangan dari model triplehelix yang mengintegrasikan inovasi, pengetahuan dan civil society. Ada empat stakeholder yang berkolaborasi dalam model pentahelix yakni Perusahaan (Business), Pemerintah (Government), Akademisi (academician), masyarakat sosial (civil society) dan media (catalisator). (Supta, 2014)

Dalam membangun sebuah tim agar tercipta lingkungan yang tepat bagi semua diperlukan interaksi dan kolaborasi. Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menelurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Di dalam sebuah organisasi yang saling tergantung, kolaborasi menjadi kunci pemikiran kreatif. Kolaborasi itu penting untuk mencapai hasil terbaik saat menyelesaikan masalah yang rumit. Pada perkembangannya terdapat model kolaborasi dari yang sederhana terdiri dari dua pihak, kemudian berkembang menjadi tiga, empat, dan sampai lima pihak.

Kolaborasi tiga pihak atau dikenal dengan pendekatan triple-helix diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (1995). Kolaborasi ini menekankan bahwa interaksi ketiga komponen merupakan kunci utama bagi peningkatan kondisi yang kondusif bagi lahirnya inovasi, keterampilan, kreativitas, ide dalam pengembangan ekonomi kreatif. Triple-helix merupakan suatu pendekatan yang menguraikan tentang bagaimana sebuah inovasi muncul dari adanya hubungan yang seimbang, timbal balik, dan terus menerus dilakukan antar akademisi (perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan), pemerintah (government), dan para pelaku/sector bisnis (enterprises). Sinerginitas ketiga komponen tersebut dikenal dengan istilah ABG (Academic, Business, and Government).

Konsep quadruple-helix disarankan pertama kali oleh Carayannis & Campbell (2009) dengan menambahkan helix keempat dari model Triple-Helix yang telah ada. Helix keempat ini diidentifikasi sebagai helix yang terasosiasi dengan 'media', 'industri kreatif', 'budaya', 'nilai-nilai', 'gaya hidup', dan 'seni'.

Alasan ditambahkannya helix keempat tersebut adalah karena nilai-nilai dan 5 budaya, di satu sisi, dan bagaimana realitas publik terbentuk dan dikomunikasikan oleh media, di sisi yang lain, memberikan dampak bagi sistem inovasi sebuah komunitas atau negara. Peran media sangat penting dalam membentuk atau mengarahkan inovasi apa yang menjadi prioritas dalam sebuah negara. Adapun konsep penta-helix juga disarankan oleh Carayannis & Campbell (2010) dimana helix kelima merupakan penekanan aspek lingkungan alami (ekologi sosial) dari masyarakat dan ekonomi bagi pengetahuan produksi dan sistem inovasi.



**Gambar 1.5 Model *Pentahelix***

*Sumber: Halibas et, 2017*

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejak dulu, desa identik dengan daerah pinggiran, persawahan, kurangnya fasilitas dan lainnya. Namun hal ini mungkin saja sudah berubah, karena adanya pembangunan dengan prioritas wilayah desa. Seperti yang

disebutkan sebelumnya pada salah satu strategi pembangunan nasional, tepatnya pada dimensi pemerataan dan kewilayahan yang menekankan dengan prioritas wilayah desa, wilayah pinggiran, luar jawa, dan kawasan timur.

Pembangunan daerah dan desa merupakan salah satu agenda utama pemerintahan Jokowi-JK sebagaimana yang tercantum dalam Nawa Cita ketiga yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Pembangunan desa atau daerah kini sudah jelas telah menjadi prioritas utama pemerintah. Pembangunan kini diratakan ke seluruh Indonesia bahkan pemerintahan saat ini tengah mengutamakan pembangunan daerah pinggiran ketimbang pembangunan Ibu Kota agar elemen masyarakat terkena dampak pembangunan. ([www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id))

Keberhasilan suatu pembangunan dapat kita lihat dari berbagai aspek, antara lain yaitu aspek sosial budaya, hukum, pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan, serta pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang umum karena dapat diukur secara kuantitatif dan dapat mendorong aspek-aspek pembangunan lainnya. Jika pertumbuhan berlangsung secara efektif dan berkelanjutan, maka daerah-daerah lain juga akan terpacu untuk dapat tumbuh dan berkembang semestinya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Kemenkeu,2016).

Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud daripemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonominya sendiri secara mandiri. Hal ini dilakukan agar desa dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga desanya. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan mempercepat laju pembangunan nasional.

Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat untuk menganggarkan Dana Desa untuk diberikan kepada desa. Kebijakan dana desa adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan serta untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Salah satu tujuannya adalah pengentasan kemiskinan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana desa dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Tujuan penggunaan dana desa di dalamnya adalah untuk

membiyai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa (terbesar) yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggung jawaban pelaporan Dana Desa. Tahun 2021, total Pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa.

Dana Desa disalurkan dalam dua kategori, yaitu Reguler dan Mandiri. Kategori tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun serta ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021, penyaluran Dana Desa Reguler dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: Tahap I (40 persen) bulan Januari; Tahap II (40 persen) bulan Maret; dan Tahap III (20 persen) bulan Juni. Sementara, penyaluran Dana Desa Mandiri dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I (60 persen) bulan Januari; dan Tahap II (40 persen) bulan Maret. Realisasi penyaluran secara Reguler per 10

Januari 2022 sebesar Rp46,12 triliun (73.198 desa), sedangkan secara Mandiri sebesar Rp1,37 triliun (1.741 desa). (setkab.go.id).

Menurut UU No.6 tahun 2014 tentang daerah pasal 72 Dana Desa ber sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa dan Desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasayarakatan. Adapun perbedaan penyaluran Dana desa adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan APBN 2020 dan APBN 2021**

Uraian (triliun Rupiah)	2020	2021	
	Perpres 72/2020	RAPBN	APBN
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	1.699,9	1.776,4	1.743,6
<b>I. PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>	1.698,6	1.775,5	1.742,7
1. Penerimaan Perpajakan	1.404,5	1.481,9	1.444,5
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	294,1	293,5	298,2
<b>II. PENERIMAAN HIBAH</b>	1,3	0,9	0,9
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	2.739,2	2.747,5	2.750,0
<b>I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT</b>	1.975,2	1.951,3	1.954,5
1. Belanja K/L	836,4	1.029,9	1.032,0
2. Belanja Non K/L	1.138,9	921,4	922,6
<b>II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>	763,9	796,3	795,5
1. Transfer ke Daerah	692,7	724,3	723,5
2. Dana Desa	71,2	72,0	72,0
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	(700,4)	(597,9)	(633,1)
<b>D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)</b>	(1.039,2)	(971,2)	(1.006,4)
<b>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</b>	(6,34)	(5,50)	(5,70)
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	1.039,2	971,2	1.006,4

Sumber: Kementerian Keuangan RI ( [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) )

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan di kisaran 5 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Rp14.600, tingkat suku bunga SBN-10 tahun 7,29 persen , harga minyak 45 USD/barrel, *lifting* minyak 705 rbph, *lifting* gas 1.007 rbsmph. Kemudian sasaran dan indikator pembangunan ditambahkan Nilai Tukar Petani antara 102-104 dan Nilai Tukar Nelayan 102-104. Dalam

postur APBN 2021, pendapatan negara ditargetkan Rp1.743,6 triliun, belanja negara Rp2.750 triliun, belanja negara di tahun 2021 tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.954,5 triliun, yang terdiri atas anggaran untuk belanja K/L sebesar Rp1.032 triliun, serta anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp795,5 triliun. Dalam APBN tahun 2021 mengalami defisit sebesar Rp1.006,4 triliun atau 5,70 persen terhadap PDB mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi, yang berarti turun dari defisit pada Perpres 72/2020 sebesar 6,34 persen. Sedangkan defisit RAPBN tahun 2021 sebesar 5,50 persen.

UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah berupa DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Pemda. Dana Bagi Hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dengan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (fiscal equalization) di Indonesia. Sedangkan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Detailnya, diluar dari ketiga fungsi tersebut penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat

di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan dana desentralisasi yang ditransfer pemerintah pusat setiap tahunnya diharapkan dapat mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran (Suyanto, 2009).

Hal tersebut selaras dengan kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah terkait pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana sejak 1 Januari 2001 Indonesia resmi mengimplementasi

kan pola otonomi daerah dari sisi kewenangan serta sisi keuangan melalui desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut didasarkan kepada Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari sisi kewenangan, sebelumnya pelaksanaan otonomi daerah diletakkan di level provinsi namun saat ini penyerahan wewenang lebih dititikberatkan di level kabupaten/kota. Hal ini tentu saja dapat memperpendek rentang birokrasi. Dari sisi keuangan, desentralisasi fiskal dimaksudkan sebagai salah satu kebijakan bagi pemerintah untuk menciptakan aspek kemandirian dalam memenuhi aspek penciptaan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi ekonomi 1998 dengan tujuan dapat mencapai

pemerataan pembangunan ekonomi diseluruh daerah, kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonominya. Tujuan utamanya untuk melakukan estimasi dan membuktikan bagaimana variable transfer daerah seperti DID, DAU,DAK,dan DD dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pembangunan ekonomi. Selanjutnya IPM dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi model 2SLS.

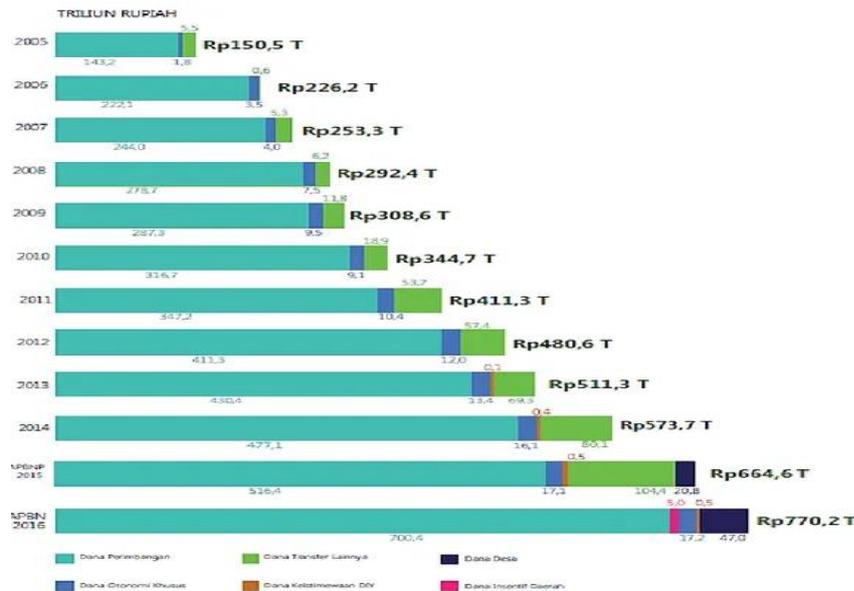
Sejalan dengan meningkatnya kewenangan yang diberikan kepada daerah, melalui desentralisasi fiskal, diharapkan alokasi anggaran daerah akan semakin efektif dan efisien. Melalui peningkatan efisiensi alokasi anggaran diharapkan mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan akan berdampak besar pada berbagai sektor ekonomi, seperti meningkatnya konsumsi, kebutuhan akan jasa perencanaan dan pembangunan, serta penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, desentralisasi diharapkan dapat memicu kreativitas dan ide baru oleh para pelaku di daerah serta memberikan dampak yang sangat positif, terutama menyangkut pemerataan PDB per kapita di Indonesia. Pemerataan pendapatan ini akan berarti meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja di daerah, termasuk pekerjaan yang berpendapatan tinggi (high paying jobs).

Pada tahun 2017, pemerintah pusat telah menganggarkan transfer ke daerah dan termasuk juga Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Transfer ke daerah mencapai Rp. 755,9 triliun meningkat dengan selisih Rp. 10,3 triliun pada tahun 2018 yaitu menjadi sebesar Rp. 766,2 triliun. Sedangkan untuk dana desa juga ikut meningkat yang awalnya hanya Rp. 5,8 triliun menjadi Rp. 60 triliun. Harapannya, dengan anggaran yang meningkat maka desa dapat

mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.

Beda pemerintahan berbeda pula fokus penggunaan atau alokasi anggaran. Perbedaan itu muncul dikarenakan adanya faktor eksternal maupun perbedaan kebijakan masing – masing pemerintahan. Perbedaan fokus alokasi anggaran ini setidaknya terlihat dari proporsi penggunaan anggaran antara pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang sudah berlangsung hampir lima tahun (2014 – 2019) dengan pemerintahan sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono (2009 – 2014).

Pada awal pemerintahannya, Jokowi – JK sudah memangkas subsidi bahan bakar minyak. Pemerintahan ini memilih merealokasikan anggaran subsidi untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama dalam agenda kerjanya, selain bidang pendidikan dan kesehatan. Karena itu, alokasi anggaran infrastruktur pada masa pemerintahan Jokowi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Terutama pada masa pemerintahan Jokowi-JK pembangunan berfokus pada daerah pinggiran yaitu pedesaan.



**Gambar 1. 6 Grafik Perbandingan Transfer ke Daerah Tahun 2005 - 2016**

Sumber: Kementerian Keuangan RI ( [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) )

Dilihat dari grafik diatas, perkembangan dana transfer ke daerah meningkat jauh lebih pesat pada masa pemerintahan Jokowi – JK. Pada Era SBY rata-rata alokasi transfer daerah sebesar 32 % dari total belanja Negara. Di era Jokowi, rata- rata alokasi transfer daerah mampu ditingkatkan mencapai 36 % dari total belanja Negara. Transfer daerah juga difokuskan melalui Dana Otonomi Khusus atau Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pembangunan infrastruktur fisik yang dapat menambah daya saing daerah. Komitmen untuk mendukung pembangunan dari pinggiran juga ditunaikan melalui implementasi Dana Desa pada 2015. Anggaran Dana Desa terus bertambah dari Rp 20,8 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 47,0 triliun pada tahun 2016. Tujuan pemerintahan Presiden Jokowi memberikan Dana Desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Salah satu komitmen Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan desentralisasi fiskal ditunjukkan dengan peningkatan jumlah alokasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) dalam jangka menengah. Sejalan dengan amanat UU Desa, jumlah alokasi TKD kemudian juga ditambah dengan komponen Dana Desa (DD) sejak tahun 2018. Bahkan jika dilihat dalam postur APBN 2021, alokasi belanja TKDD lebih besar dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pusat.



**Gambar 1.7 Grafik Transfer Ke Daerah dan Dana Desa**

Sumber : Badan Pusat Statistik ( [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) )

Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp796,3 triliun pada rancangan APBN 2021. Dana tersebut akan difokuskan untuk pemulihan ekonomi di desa serta mendukung pengembangan sektor prioritas. Dengan anggaran Rp 796,3 triliun ini, terjadi penurunan alokasi pada tahun sebelumnya. Sedangkan, transfer ke daerah terus meningkat. Dari Rp 766,2 triliun pada tahun 2018, Rp 826,77 triliun pada tahun 2019, hingga Rp 856,94 triliun pada tahun 2020.

Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat

perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana tersebut (Kemendes PDTT, 2016).

**Tabel 1. 3**

**Rincian Dana Desa Menurut Provinsi/Kabupaten di Indonesia Tahun 2021**

Nama Daerah	Jumlah Desa	Dana Desa
Batu Bara	151	121.071 Juta
Asahan	204	152.083 juta
Sumatera Utara	6.108	795,5 triliun
Indonesia	83.381	72 triliun

Sumber : Kementerian Keuangan RI ( [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) )

Pada tabel diatas menunjukkan Rincian Dana Desa (DD) Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia menerima transfer Dana Desa sebesar 72 Triliun dengan jumlah 83.381 desa, sedangkan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan transfer Dana Desa sebesar 795,5 Triliun dengan jumlah 6.108 desa.

Kabupaten Asahan berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Terletak pada garis 2°03’-3°26’ Lintang Utara, 99°1’-100°0’ Bujur Timur dengan ketinggian 0–1.000 m diatas permukaan laut. Kabupaten Asahan menempati area seluas 3.732,97 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 25 Kecamatan, 27 Kelurahan, 204 Desa/Kelurahan Definitif. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge merupakan Kecamatan yang terluas, dengan luasnya sebesar 713,63 km<sup>2</sup> atau sekitar 19,11 % dari total luas Asahan, diikuti Kecamatan Sei Kepayang dengan luas 370,69 km<sup>2</sup> atau 9,93 %. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Kisaran Timur

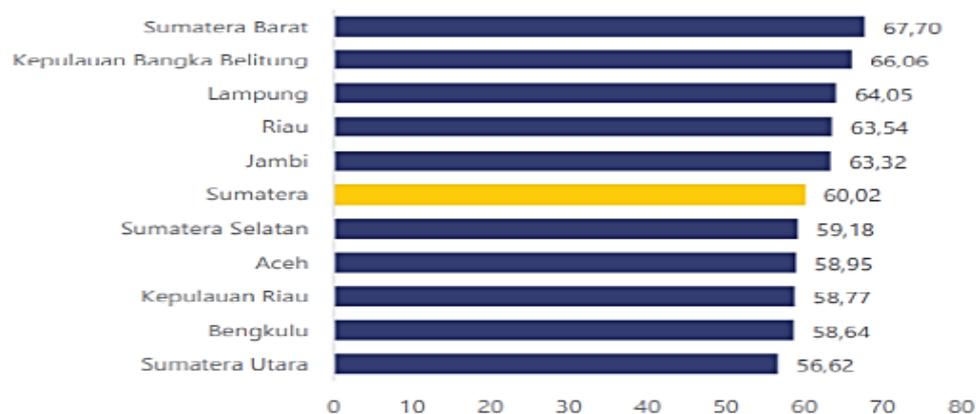
dengan luas 30,16 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,80% dari total luas wilayah Kabupaten Asahan.

Batu Bara adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Asahan dan beribu kota di kecamatan Lima Puluh. Kabupaten Batu Bara adalah salah satu dari 16 kabupaten dan kota baru yang dimekarkan pada tahun 2006. Kabupaten Batu Bara memiliki 12 kecamatan, 10 kelurahan dan 141 desa. Luas wilayahnya mencapai 904,96 km<sup>2</sup> dan penduduk 412.992 jiwa dengan kepadatan penduduk 456 jiwa/km<sup>2</sup>. Sejak dimulainya program Dana Desa, pemerintah dan masyarakat mengutarakan begitu banyak harapan yang di antaranya adalah untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat serta untuk membangun infrastruktur dan sektor padat karya yang bisa langsung berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam menggambarkan hasil pembangunan dari pinggiran terdapat beberapaindeks yang digunakan diantaranya Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dan Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia. Pengukuran IPD terakhir dibangun dari hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018 yang dilaksanakan oleh BPS pada bulan Mei 2018 dan digunakan sebagai rujukan indikator-indikator utama penyusun indeks. Sementara IDM adalah indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan

budaya. Indeks ini disusun mulai tahun 2015 dengan memberdayakan seluruh desadi Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam menghasilkan data yang akurat.

Melalui IPD, pembangunan desa yang ditargetkan RPJMN 2015-2019, mengamanahkan berkurangnya desa tertinggal sebanyak 5.000 desa, serta peningkatan desa mandiri sebanyak 2.000 desa. Dengan amanat tersebut maka desa diklasifikasikan berdasarkan IPD menjadi desa mandiri, desa berkembang dan desatertinggal. Pembangunan desa di Indonesia terjadi secara nasional, desa yang tergolong dalam kategori desa berkembang dengan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebesar 59,36. Hasil rata-rata indeks pada tingkat pulau menunjukkan adatiga pulau yang memiliki nilai indeks di atas rata-rata Indeks Pembangunan Desa nasional, ketiga pulau tersebut adalah Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa-Bali. Sementara empat pulau lainnya berada di bawah rata-rata nasional yaitu Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.



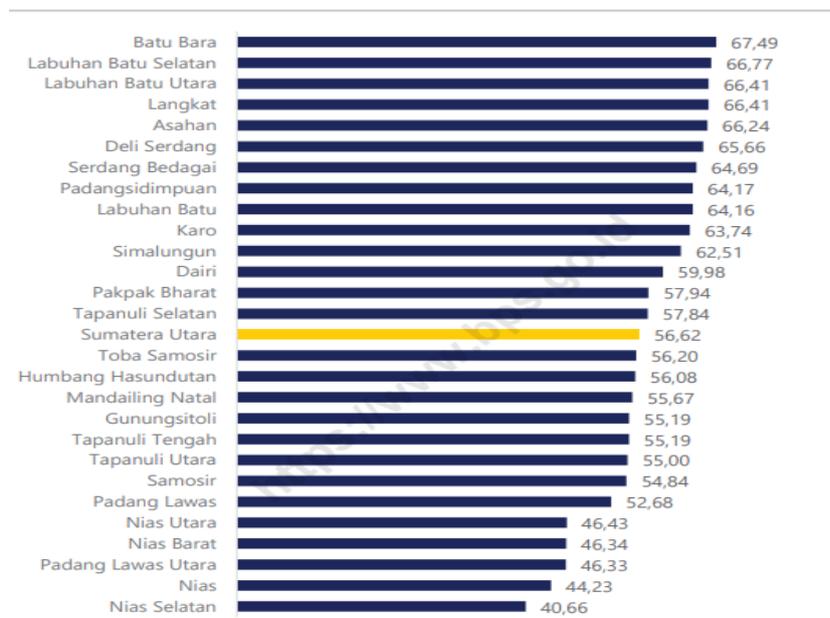
**Gambar 1.8 Grafik Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Pulau Sumatera,2018**

Sumber: Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui kondisi perkembangan desa di Pulau Sumatera memiliki nilai IPD tertinggi adalah Provinsi Sumatera Barat

dengan nilai indeks 67,70, di ikuti oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 66,06 serta Provinsi Lampung dengan nilai 64,05. Sedangkan nilai Indeks Pembangunan Desa terendah beradadi Provinsi Sumatera Utara dengan nilai indeks 56,62.

Kondisi perkembangan desa di Sumatera Utara memiliki rata-rata nilai Indeks Pembangunan Desa sebesar 56,62437 desa, angka ini masih dibawah rata-rata nasional yaitu sebesar 59,36. Dari 5.437 desa, terdapat 3.768 desa dalam kategori berkembang (69,30%), sebanyak 200 desa mandiri (3,68%) dan sisanya sebanyak 1.469 desa (27,02%) dalam kategori tertinggal. Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Sumatera Utara memiliki nilai rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastuktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 41,71, untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks adalah sebesar 54,94, dimensi pelayanan umum sebesar 49,67 dan dimensi penyelenggaraan pemerintah sebesar 62,4



**Gambar 1. 9 Grafik IPD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara, 2018**

Sumber: BPS Provinsi Sumatra Utara ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa tertinggi di Provinsi Sumatra Utara terdapat di Kabupaten Batu Bara dengan angka 67,49. Sedangkan kabupaten Langkat berada di posisi ke 4 (Empat) dengan angka 66,41 sama seperti Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dan untuk rata-rata nilai indeks terendah di Provinsi Sumatra Utara terdapat di Kabupaten Nias Selatan dengan rata-rata IPD sebesar 40,66.

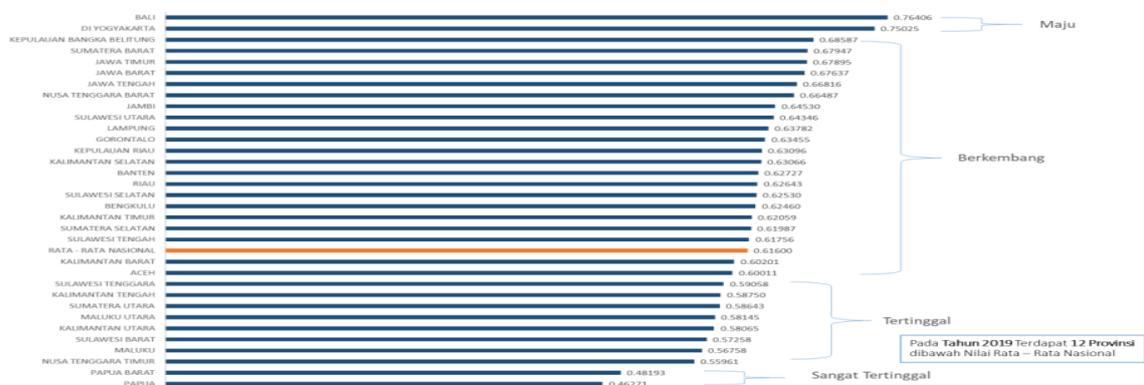
Hasil IPD dapat memberikan gambaran bahwa desa-desa yang telah teregistrasi, terpetakan menurut kondisi pembangunan desa. Perkembangan pembangunan desa yang secara panel ini dilakukan untuk mengetahui realitas pembangunan desa yang sesungguhnya, dan memperkirakan seberapa besar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibangun di tingkat desa.

Sementara itu, Indeks Desa Membangun (IDM) yang dibangun oleh Kemendesa PDTT merupakan indeks yang memetakan status perkembangan desa yang memperhatikan karakteristiknya. Indeks ini digunakan sebagai instrumen untuk melakukan *targeting* dalam pencapaian IKU Kementerian Desa, PDTT 2015-2019.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk

mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

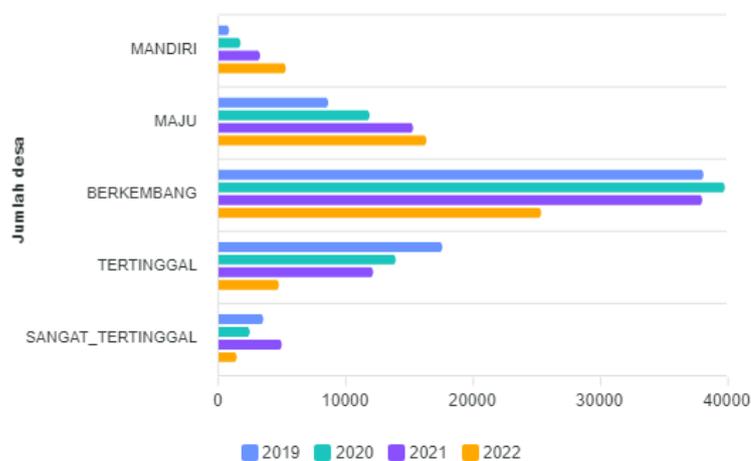
Pengakuan dan penghormatan Negara kepada Desa yang disertai dengan redistribusi sumberdaya dan kewenangan pembangunan secara penuh sebagaimana mandat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, memberikan tanda yang jelas bahwa dari situlah Desa harus menjadi tumpuan untuk membangun Indonesia. Disebutkan Menteri Desa, "IDM lebih komprehensif jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD), karena IDM ini mengedepankan pendekatan yang bertumpu kepada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi, tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal" guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada guna mengurangi angka kemiskinan.



**Gambar 1.10 Grafik rata-rata IDM di Indonesia Provinsi, 2019**

Sumber: BPS Indonesia ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Dapat dilihat pada gambar diatas bahwa nilai IDM paling besar terdapat di Provinsi Bali dengan nilai 0,76406 yang memasuki kategori maju. Sementara nilai rata-rata nasional memiliki nilai sebesar 0,61600 yang memasuki kategori berkembang. Dan pada tahun 2019 terdapat 12 Provinsi yang memiliki IDM dibawah nilai rata-rata atau tertinggal salah satunya termasuk Provinsi Sumatra Utara dengan nilai indeks 0,58643.



**Gambar 1.11 Grafik Perkembangan Pembangunan Desa Menurut Status IDM**

Sumber : Kemendesa PDTT ([www.kemendes.go.id](http://www.kemendes.go.id))

Menurut tabel di atas pada tahun 2020 Indeks Desa Membangun (IDM) memiliki kategori terbanyak dengan desa berkembang yaitu 38086 desa, pada tahun 2022 4770 kategori desa tertinggal dan 1439 desa yang sangat tertinggal. Nilai IDM tertinggi dipegang oleh Desa tahun 2021 dengan nilai 51,57 persen yang termasuk kategori Desa berkembang. Sedangkan tahun 2022 menurun dengan jumlah nilai 47,69 persen yang juga termasuk kategori berkembang. IDM dengan kategori sangat tertinggal terdapat pada Desa dengan nilai 2,70 persen.

Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap dari pada wilayah lainnya dan wilayah dengan kota/kabupaten yang besar, dimana paling banyak ditemui sektor industri dan jasa daripada di wilayah bagian Sumatera Utara lainnya. Wilayah Pantai Timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia Belanda. Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara sendiri meliputi 12 kabupaten yang terdiri dari Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Labuhan Batu Selatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, wilayah Pantai Timur memiliki pertumbuhan perekonomian yang cukup baik, namun disertai dengan pentahelix pembangunan ekonomi antar daerah kota/kabupaten di wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu menarik untuk saya meneliti bagaimana kondisi sebenarnya dana desa dapat mengembangkan ekonomi desa dalam mendukung pembangunan ekonomi yang ada di setiap kabupaten wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara. Maka penelitian ini berjudul **“ANALISIS KONSEP *SDGs* DAN DANA DESA DALAM *PENTAHELIX SYSTEM* UNTUK MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN EKONOMI DI WILAYAH PANTAI TIMUR PROVINSI SUMATERA UTARA (Studi Kasus : Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara)**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Indonesia tercatat memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi masih lebih baik dibandingkan dengan Negara-negara lainnya selama pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2021 tumbuh sebesar -0,71 persen, naik dibandingkan dengan triwulan IV-2021 sebesar -2,19 persen. Akan tetapi nyatanya masih ada masalah kemiskinan dan ketidakmerataan
2. Pelaksanaan anggaran Dana Desa yang sangat besar tersebut masih mempunyai kendala. Salah satunya masih rendahnya aparatur Pemerintah Daerah dan Desa untuk mengelola penggunaan Dana Desa serta rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat desa kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara.
3. Pengalokasian Dana Desa dari APBN terus meningkat, setidaknya pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 468 triliun untuk percepatan pembangunan desa pada tahun 2022. Namun, Dana Desa hanya berpengaruh terhadap penduduk hampir miskin melalui peningkatan pengeluaran per kapitanya, akan tetapi tidak mampu menyentuh pada masyarakat yang berada di level sangat miskin. Sehingga penyaluran Dana Desa dianggap kurang efektif.
4. Konsep SDGs dan *Pentahelix System* yang diberikan kepada pemerintah tidak menunjukkan pentingnya *Pentahelix System* dalam rangka pengelolaan dana desa

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya dibatasi pada masalah seberapa besar kebijakan dana desa mampu mempengaruhi pengembangan ekonomi pedesaan dalam dalam

mencapai percepatan pemulihan ekonomi Desa dengan konsep *pentahelix* di wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara.

#### 1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan indikator sosial dan ekonomi di wilayah pantai timur provinsi sumatera utara pada 4 Kabupaten Asahan, Batu Bara, Serdang Bedagai, Deli Serdang ?
2. Bagaimana capaian dari Indeks Desa Membangun (IDM) pada Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara di wilayah Provinsi Sumatera Utara ?
3. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *pentahelix system* dalam perencanaan pembangunan ekonomi desa di wilayah Kabupaten Batu Bara.?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan indikator sosial dan ekonomi pada 4 Kabupaten Asahan, Batu Bara, Serdang Bedagai, Deli Serdang.
2. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang capaian Indeks Desa Membangun (IDM) pada Kabupaten Asahan dan Batu Bara
3. Melakukan analisa faktor yang mempengaruhi pentingnya *pentahelix system* dalam rangka pengelolaan dana desa.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian diatas, penelitian ini dapat bermanfaat, yakni:

1. Manfaat akademik :

- a. Membantu perkembangan ilmu ekonomi terkhususnya ekonomi publik dan ekonomi pembangunan tentang kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam mengetahui evaluasi kebijakan dana desa.
- c. Memberikan pengetahuan dalam mengelola anggaran pemerintah khususnya Dana Desa.

2. Manfaat non akademik :

- a. Bagi pemerintah daerah desa wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan kebijakan daerah khususnya Alokasi Dana Desa.
- b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
- c. Dapat menjadikan suatu pemahaman bagi para pembaca agar memberikan suatu ilmu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pembangunan Ekonomi**

Secara umum Pembangunan Ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi secara luas didefinisikan sebagai pembangunan yang terjadi melalui proses multidimensional yang dimana didalamnya terdapat berbagai macam variabel dari perubahan besar yang dimana terjadi dalam sebuah struktur sosial, sikap dari masyarakat, berbagai macam kelembagaan nasional dan juga percepatan dari pertumbuhan ekonomi, dan juga pengurangan serta ketidakmerataan, dan yang terakhir adalah penghapusan dari kemiskinan mutlak dalam (Todaro, 2017).

Proses pembangunan yang terjadi di masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan dalam (Todaro dan Smith, 2017).

Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada

untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru, dimana kesemuanya ini merupakan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat di daerah. Pembangunan ekonomi dapat juga disebut sebagai pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayahnya dan dalam konteks ini istilah yang paling tepat digunakan adalah pembangunan wilayah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi berisi strategi pembangunan daerah yang dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional. Pengertian pembangunan dalam hal ini banyak digunakan para pembuat kebijakan sebagai usahanya membangun stabilitas perekonomian negara dalam (Jhingan, 2014).

Pembangunan memiliki konsep melalui proses yang meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu. Oleh karena itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Upaya pembangunan juga untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin. (Todaro & Smith, 2017).

Kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental dari suatu masyarakat, melalui kombinasi tertentu dari proses, sosial, ekonomi, dan lembaga yang memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen yang tercakup dalam kehidupan

---

yang lebih baik itu, pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tujuan dalam (Todaro & Smith, 2017).

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, di mana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualisme ekonomi antara desa dan kota. Jika hal itu dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan dalam (Todaro & Smith, 2017).

### **2.1.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi Klasik**

#### **1. Adam Smith (1723-1790)**

Adam Smith (1723-1790) Bapak dari ilmu ekonomi modern yang terkenal dengan teori nilainya yaitu teori yang menyelidiki fakto-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu barang. Bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* (1776) yang terkenal dengan buku *Wealth of Nations* yang tema pokoknya mengenai bagaimana perekonomian itu tumbuh. Adam Smith melihat proses pertumbuhan ekonomi itu dari dua segi yaitu pertumbuhan output (GNP) total, dan pertumbuhan penduduk. Pembagian kerja merupakan titik permulaan dari teori pembangunan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja dalam (Jhingan, 2014).

## 2. David Ricardo (1772-1823)

Teorinya tidak jauh beda dengan teori Adam Smith (perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output). Jumlah faktor produksi (SDA, tanah) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatasan dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat (Jhingon dan Torado). Teori Ricardo ini diungkapkan dalam bukunya berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* (1817). melalui teori Ricardian menganalisis mengenai proses terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah “pada awalnya jumlah penduduk sangat rendah dan kekayaan alam masih melimpah. Dalam keadaan seperti ini para pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan kekayaan alam sebagai faktor produksi mengakibatkan para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang tinggi untuk mempertinggi tingkat modal yang dimiliki sehingga dapat mempertinggi produktifitas tenaga kerja. Dalam perkembangan selanjutnya dengan adanya kenaikan tingkat produktifitas maka para pekerja akan menuntut upah tinggi. Teori tersebut memunculkan beberapa asumsi yaitu :

- 1) Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri
- 2) Berlakunya hukum : “ *law of diminishing return* “ bagi tanah
- 3) Persediaan tanah adalah tetap
- 4) Permintaan gandum benar- benar inelastik
- 5) Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel
- 6) Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu
- 7) Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal
- 8) Harga penawaran buruh adalah tertentu

9) Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal

10) Terdapat persaingan sempurna

11) Pemupukan modal dihasilkan dan keuntungan

Teori David Ricardo hadir dalam kondisi perekonomian yang dikuasai oleh kaum kapitalis yang menganggap bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan mengalami kenaikan yang signifikan bila mana faktor-faktor produksi diolah secara baik dengan sistem distribusi yang merata. Pemanfaatan teknologi pertanian kurang diperhatikan oleh David Richardo mengingat bahwa tenaga kerja adalah sumberdaya yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran yang terjadi.

#### **2.1.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis**

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada.

#### **2.1.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi Aliran Keynesian**

Ekonomi Keynesian merupakan nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang hidup antara tahun 1883 sampai 1946. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari *Great Depression*. Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan

meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Teori Keynes ini menelurkan banyak intervensi kebijakan ekonomi pada era terjadinya *Great Depression*.

Pada Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika *Great Depression* melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh.

Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Selama terjadi *Great Depression*, hal ini bagaimanapun merupakan solusi yang tidak populer. Namun demikian, belanja pertahanan pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt membantu pulihnya perekonomian Amerika Serikat.

Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu –

laizes-faire capitalism (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah dalam (Jhingan, 2010).

#### **2.1.1.4 Teori Pembangunan Ekonomi Neo-Klasik**

Teori ini berkembang pada pertengahan tahun 1950-an. Analisis pertumbuhan ekonominya didasarkan pada pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Teori ini menyanggah Teori Keynesian yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terletak pada tingkat pengeluaran (konsumsi) masyarakat. Menurut teori ini, pertumbuhan terletak pada penawaran (*supply*) faktor produksi dan tingkat produksi. Semakin tinggi tingkat sumber ekonomi dan teknologi, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan beberapa penjelasan mengenai paradigma pembangunan neo-klasik. Pendapat neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagaiberikut :

1. Neo-klasik merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi. Menurut neo-klasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan

tingginya tingkat tabungan. Pada suatu tingkat tertentu, tingkat bunga menentukan tingginya tingkat investasi.

2. Perkembangan merupakan proses yang gradual. Perkembangan merupakan proses yang bertahap dan berlangsung terus-menerus.

3. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif. Proses perkembangan meliputi semua faktor yang terlibat untuk tumbuh bersama. Sebagai contoh alat-alat produksi yang tersedia akan memiliki tingkat produktivitas tinggi bila faktor sumber daya manusianya juga mendukung.

4. Aliran neo-klasik merasa optimis terhadap perkembangan. Aliran sebelumnya (klasik) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terhambat karena terbatasnya sumber daya alam, sedangkan aliran neo-klasik yakin bahwa manusia mampu mengatasi keterbatasan tersebut.

5. Adanya aspek internasional dalam perkembangan tersebut. Dengan adanya pasar yang luas, memungkinkan produksi sebesar-besarnya sehingga produktivitas semakin meningkat.

Menurut Teori Neo-Klasik, negara merupakan unit analisis utama, penekanan ini secara implisit menyatakan cara pandang neo-klasik terhadap sejarah yang linear dan suatu asumsi bahwa negara per negara bisa maju dengan usaha sendiri serta berkembang dari keadaan belum maju atau terbelakang menjadi progresif.

Prinsip kunci pandangan neo-klasik tentang pembangunan adalah memaksimalkan keuntungan bagi konsumen dan produsen secara individual,

keuntungan bersama yang bisa diperoleh dari perdagangan nasional dan Internasional , serta pencapaian kemajuan ekonomi dan sosial dengan cara mengejar kepentingan pribadi yang senantiasa dicerahkan. Kenyataannya, keuntungan yang diharapkan jarang terpenuhi dan prinsip-prinsip itu sendiri sedikit berhubungan, atau tidak berjalan seiring dengan realitas ekonomi atau realitas sosial. Ini terjadi juga di negara-negara maju, terlebih lagi di negara-negara belum maju. Ketika beberapa negara baru memperoleh kebebasannya (kemerdekaan), pembangunan di bidang ekonomi perlu dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Berbagai cara, pendekatan, dan tindakan dilakukan dalam hal kebijakan dan prioritas pembangunan semata-mata dimaksudkan untuk menyejahterakan seluruh masyarakatnya.

### **2.1.2 Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Menurut Zaini Ibrahim, “Kebijakan Fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijaksanaan fiskal yang berupa pengurangan

pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat peraturan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik. Adapun instrument dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

1. Belanja/pengeluaran negara ( $G = \text{government expenditure}$ )
2. Perpajakan ( $T = \text{taxes}$ )

Kebijakan fiskal juga bisa dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka :

1. Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha
2. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, kesempatan kerja yang tinggi
3. Membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.

#### **2.1.2.1 Tujuan Kebijakan Fiskal**

Pada dasarnya, Kebijakan fiskal bertujuan untuk memengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Due, yaitu :

- 1) Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
- 2) Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum
- 3). Berdasarkan teori Keynesian, kenaikan belanja pemerintah sehingga APBN mengalami defisit dapat digunakan untuk merangsang daya beli masyarakat ( $AD = C + G + I + X - M$ ) dan mengurangi pengangguran pada saat terjadi resesi/depresi ekonomi.
- 3) Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

### **2.1.2.2 Jenis-jenis Kebijakan Fiskal**

Pada dasarnya kebijakan fiskal terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Kebijakan fiskal Ekspansif (*expansionary fiscal policy*), yaitu kebijakan ini menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan Ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tinggi.
- 2) Kebijakan Fiskal Kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

Secara teoritis dikenal empat jenis kebijakan fiskal, yaitu :

1. Pembiayaan fungsional (*The functional finance*)

Pembiayaan Fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Ada beberapa hal penting yang biasanya dilakukan oleh pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional ini, yaitu:

- a) Pajak bukan hanya difungsikan sebagai alat menggali sumber penerimaan, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengatur sektor swasta (*private sector*).
- b) Apabila terjadi inflasi yang berlebihan, biasanya untuk mendanai penarikan dana masyarakat, maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri.
- c) Apabila pencapaian target pajak dan pinjaman ternyata tidak cepat, maka pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri bentuk percetakan uang.

## 2. Pendekatan anggaran terkendali (*the managed budget approach*)

Pendekatan anggaran terkendali adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap.

Dalam konsep ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan penarikan pajak selalu di jaga. Kemudian untuk menghindarkan atau memperkecil ketidakstabilan ekonomi selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran, sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

### 3. Stabilitas anggaran (*the stabilizing budget*)

“Stabilitas anggaran adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program”. Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Dalam stabilitas anggaran ini, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dengan kata lain, berdasarkan stabilitas perekonomian yang otomatis, pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Sedangkan pengenaan pajak ditentukan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh.

### 4. Pendekatan anggaran belanja berimbang (*balance budget approach*)

Pendekatan anggaran belanja berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Selain itu juga untuk tercapainya anggaran berimbang jangka panjang. Dengan kata lain, konsep anggaran berdasarkan pendekatan anggaran belanja berimbang menekankan pada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Ini berarti jumlah pengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Sehingga pemerintah tidak perlu berhutang, baik berhutang dari dalam negeri maupun keluar negeri.

#### **2.1.2.3 Indikator Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan

agregat (khususnya permintaan swasta).

“Indikator yang biasa dipakai (meskipun kadangkala menyesatkan) untuk kebijakan fiskal ini adalah budget defisit, yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan (terutama dari pajak)”.

### **2.1.3 Teori Pengeluaran Negara**

Pengeluaran Negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu diajukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Instrumen pusat dari kebijakan pengeluaran adalah anggaran. Dalam membicarakan penyebab pokok dari pertumbuhan pengeluaran, harus dilakukan pembedaan antara pengeluaran untuk barang dan jasa, dan pengeluaran untuk transfer, karena adanya faktor-faktor yang agak berbeda dalam (Musgrave & B Musgrave, 1993).

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya sedangkan dana

yang diterima dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Adapun Teori Pengeluaran Negara sebagai berikut :

### 2.1.3.1 Musgrave dan Rostow

Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb.

### 2.1.3.2 Wagner

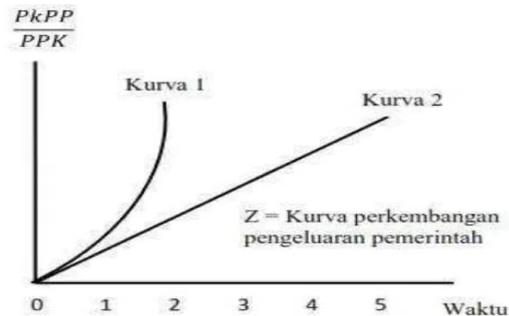
Wagner mengemukakan sebuah teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang lebih dikenal dengan sebutan hukum Wagner, yaitu semakin besar terhadap GNP. Menurut Wagner, jika dalam suatu perekonomian pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, dan sebagainya. yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PPkP}{PPk1} < \frac{PPkP}{PPk1} < \dots < \frac{PPkP}{PPk1} < \dots \dots \dots (2 - 4)$$

Keterangan:

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk 1, 2,...,n :  
jangka waktu (tahun)



**Gambar2.1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**

*Sumber: Mangkoesoebroto, 2001*

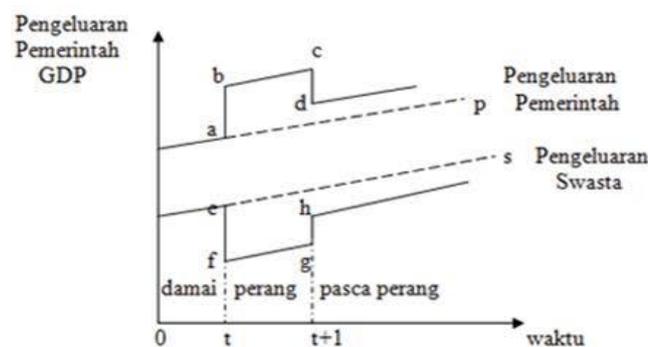
Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

### 2.1.3.3 Peacock dan Wiseman

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar. Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat. Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini:



**Gambar2. 2 Kurva Peacock dan Wiseman**

Sumber: Mangkoesebroto, 2001

Dalam keadaan normal,  $t$  ke  $t+1$ , pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun  $t$  terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun  $t+1$ , pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



**Gambar2. 3 Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave**

*Sumber: Mangkoesebroto, 2001*

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun

pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

Sedangkan tujuan dari teori mikronya, perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### a. Penentuan Permintaan

$$U_i = f(X, G) \dots \dots \dots (2-3)$$

Dimana:  $U_i = f(G, X)$

$G$  = vektor dari barang publik

$X$  = vektor barang swasta

$i$  = individu; = 1, ..., m

$U$  = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (*budget constraints*). Misalkan seorang individu ( $i$ ) membutuhkan barang publik ( $K$ ) sebanyak  $G_k$ . Untuk menghasilkan  $i$  barang  $K$  sebanyak  $G_k$ , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu,

pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat.

### b. Penentuan Permintaan

$$U_i = f(X, G) \dots \dots \dots (2-3)$$

Dimana:  $U_i = f(G, X)$

$G$  = vektor dari barang publik

$X$  = vektor barang swasta

$i$  = individu; = 1, ..., m

$U$  = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (*budget constraints*). Misalkan seorang individu ( $i$ ) membutuhkan barang publik ( $K$ ) sebanyak  $G_k$ . Untuk menghasilkan  $i$  barang  $K$  sebanyak  $G_k$ , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

### c. Penentuan tingkat output

$$U_p = g(X, G, S) \dots \dots \dots (2-3)$$

Dimana:  $U_p$  = fungsi utilitas

$S$  = keuntungan yang diperoleh politisi

$G$  = vektor barang publik

$X$  = vektor barang swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih:

$$\text{Max } U_i = f(X, G) \dots\dots\dots(2-4)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya:

$$P_x X + t B < M_i \dots\dots\dots(2-5)$$

Dimana:  $P$  = vektor harga barang swasta

$X$  = vektor barang swasta

$B_i$  = basis pajak individu 1

$M_i$  = total pendapatan individu 1

$T$  = tariff pajak

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses, yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (Price Taker). Atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang publik, sehingga Ia bertindak sebagai pengambil output (Output Taker).

## 2.1.4 Pentahelix

### 2.1.4.1 Pengertian *Pentahelix*

*Pentahelix* adalah sebuah model inovatif pengembangan dari model *QuadrupleHelix* yang menghubungkan Akademisi, praktisi/bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media untuk menciptakan ekosistem berdasarkan kreatifitas dan pengetahuan, dimana yang diharapkan dari konsep ini adalah sebuah solusi untuk pengembangan kreatifitas, inovasi dan teknologi pada industry kreatif.

Unsur *Penta Helix* ini semula berupa *Triple Helix* dengan unsur-unsur *Academics, Business Sector, Government*, yang kemudian ditambahkan dengan satu unsur, *Civil Society* (atau *Communities* dalam penelitian ini), menjadi *Quadruple Helix*, untuk mengakomodasi perspektif masyarakat, dalam hal ini merupakan “masyarakat berbasis media dan budaya” yang juga telah menjadi bagian menyeluruh dari inovasi di Abad-21 ini. Lebih jauh lagi, unsur *Communities* membuka peluang konfigurasi dan jejaring lintas disiplin, serta membebaskan konsep “inovasi” dari sekedar pertimbangan dan tujuan ekonomi, melainkan juga melibatkan kreativitas sebagai bagian dari proses produksi pengetahuan dan inovasi (Muhyi, Chan, Sukoco, & Herawaty, 2017, p. 417).

#### **2.1.4.2 Sejarah Perkembangan *Pentahelix***

Sejarah perkembangan konsep sinergitas dimulai dengan gagasan *triplehelix* yang diadopsi dari teori Etzkowitz & Leydesdorff pada tahun 2000. Konsep *triple helix* ini menitikberatkan adanya relasi antara universitas, industri dan pemerintah. Pada tahun 2014, Lindberg mengembangkan konsep baru yang disebut *quadruple helix* dengan menambahkan elemen masyarakat local sebagai pelengkap konsep *triple-helix* yang sudah duluan berkembang. Sedangkan konsep *pentahelix* diusulkan oleh Riyanto pada tahun 2018 dengan mengikutsertakan media yang saat ini peranannya sangat signifikan dalam mengembangkan modal sosial pembangunan. 15

#### **2.1.4.3 Triple Helix**

Ranga dan Etzkowitz (2013) memperkenalkan konsep sistem *Triple Helix* sebagai konstruksi analitis yang mensintesis fitur-fitur utama *Triple Helix*

interaksi dengan pendekatan sistem inovasi. Sistem *Triple Helix* adalah ditopang oleh tiga aspek utama yaitu komponen dalam sistem, relasi antara komponen, dan fungsi sistem. Komponen dasar terdiri dari lingkungan kelembagaan universitas, industri, dan pemerintahan. Menurut Tatang Suheri, Selfa Septiani Aulia (2017) Konsep *triple helix* tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Etzkowitz (2008) bahwa perkembangan inovasi di sebuah wilayah diciptakan dari adanya kolaborasi antara pemerintah, intelektual dan pelaku usaha.

*Penta helix* merupakan perluasan dari strategi *triple helix* dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga non profit dalam rangka mewujudkan inovasi. Melalui kolaborasi sinergis tersebut diharapkan terwujud suatu inovasi yang didukung oleh berbagai sumberdaya yang berinteraksi secara sinergis. *Triple Helix* diperkenalkan pertamakali pada tahun 1995, Etzkowitz dan Leydesdorff memperkenalkan model *Triple Helix* dengan unsur *Academics*, *Business Sector*, dan *Government*.<sup>31</sup> Aktor yang bertanggung jawab untuk menciptakan inovasi adalah bidang Industri. Aktor yang bertanggung jawab untuk menciptakan pengetahuan yaitu bidang Universitas. Kemudian berinteraksi dengan bidang ketiga yaitu Pemerintah. Ketiganya bekerjasama melalui pendekatan *top-down* agar tercipta inovasi yang dapat meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara.

*Triple Helix* Kemudian dikembangkan lagi dengan yang ditambahkan dengan satu unsur, *Civil Society* atau komunitas yang menjadi *Quadruple Helix*, untuk mengakomodasi perspektif masyarakat. konsep *quadruple helix* dikembangkan dengan mempertahankan interaksi dari *triple helix* model (jaringan iptek antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah) serta melibatkan masyarakat sipil

secara utuh dalam sistem. Indonesia sendiri model *Quadruple Helix* ini kemudian ditambahkan satu unsur lagi yaitu Media yang kemudian menjadi pelengkap Unsur *pentahelix* karena dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, Media (baik media konvensional maupun media sosial) memegang peran signifikan meskipun tetap merupakan elemen yang independen atau tidak langsung terpengaruh oleh unsur-unsur yang lainnya dalam melaksanakan bagian atau 17 fungsinya. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka bisa disimpulkan bahwa *Penta Helix* adalah model Inovasi yang digunakan dalam rangka untuk meningkatkan atau mengembangkat tingkat perekonomian suatu negara atau daerah yang didalamnya melibatkan lima stakholder yaitu Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media dimana kelima unsur tersebut mempunyai masing-masing peran dan pengaruh yang cukup besar apabila digabungkan dalam suatu kolaborasi dengan tujuan tertentu akan mendapat hasil yang lebih bagus dan maksimal. ([www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)).

Peran dari masing-masing faktor *helix* meliputi hal hal berikut :

1. Akademisi pada model *penta-helix* berperan sebagai *conceptor*. Seperti melakukan standarisasi proses bisnis serta sertifikasi produk dan keterampilan sumber daya manusia. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan
2. Bisnis pada model *penta-helix* berperan sebagai *enabler*. Bisnis merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan.

3. Komunitas pada model *penta-helix* berperan sebagai *accelerator*. Dalam hal ini komunitas merupakan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan bisnis yang berkembang. Bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan
4. Pemerintah pada model *penta-helix* berperan sebagai regulator. Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus berperan sebagai *controller* yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan bisnis
5. Media pada model *penta-helix* berperan sebagai *expenders*. Media berperan dalam mendukung publikasi dalam promosi dan membuat brand *image*.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

### Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian & Nama Peneliti	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
1.	<b>Muhammad Fachrurrozy Abdillah (2017)</b> Evektifitas Kebijakan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi infrastruktur pedesaan di Kabupaten Deli Serdang	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa</li> <li>• Pembangunan ekonomi</li> <li>• Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur</li> </ul>	Kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan, kebijakan dana desa memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana baru
2.	<b>Novy Setia Yunas (2019)</b> implementasi konsep pentahelix dalam pengembangan potensi desa melalui model lumbung ekonomi desa di Provinsi Jawa Timur	Deskriptif Kualitatif	Pentahelix	Mendorong sebuah model inovatif bagi pengembangan potensi desa melalui Lumbung Ekonomi Desa yang melibatkan actor pentahelix.

3.	<p><b>Handy Aribowo, Alexander Wirapraja, Yudithia Dian Putra</b> Implementasi kolaborasi model pentahelix dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata di Jawa Timur serta meningkatkan perekonomian domestik</p>	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Model pentahelix</li> <li>• Pariwisata</li> <li>• Pemerintahan dan wisatawan</li> </ul>	<p>Dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, diperlukan suatu kordinasi dan kolaborasi antara pihak pemerintah, pelaku bisnis pariwisata, komunitas, akademisi, serta media, disebut dengan kolaborasi Pentahelix dalam mengembangkan potensi wisata.</p>
4.	<p><b>Nilam Indah Susilowati, Dwi Susiliwati, syamsul Hadi (2017),</b> Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produksi Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur</p>	Kualitatif Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi Dana Desa</li> <li>• Dana Desa</li> <li>• Belanja Modal</li> <li>• PDRB</li> <li>• Kemiskinan</li> </ul>	<p>alokasi dana desa, belanja modal, produk domestik bruto efektif dan berhasil dalam mengurangi kemiskinan tiap Kabupaten/Kota. Sedangkan dana desa tidak efektif dan tidak berhasil dalam mengurangi kemiskinan tiap Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur</p>
5.	<p><b>Kiki Sudiana , Erni Tisnawati Sule, Imas Soemaryani, Yunizar Yunizar</b> Pengembangan Dan Validasi Penta Helix Membangun</p>	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• konstruk pentahelix</li> <li>• validitas konstruk</li> <li>• validitas pentahelix</li> </ul>	<p>penelitian yang memvalidasi konstruksi pengukuran Penta Helix atau Quintuple Helix. Melalui tinjauan literatur yang ekstensif, kami mengembangkan konstruk variabel Penta Helix dalam kaitannya dengan inovasi dan ekonomi berbasis pengetahuan, menjadi lima dimensi yang terdiri dari Academicians, Business, Government, Community and Medias</p>

### 2.2.1 Kebijakan Dana Desa

Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan

kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. ([www.Kemendes.go.id](http://www.Kemendes.go.id)).

#### **2.2.1.1 Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara (RKUN) langsung ke rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing pemerintah daerah yang selanjutnya oleh Pemda diteruskan ke masing - masing Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima:

1. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan
2. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
3. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima:

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/wali kota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% dari Dana Desa yang diterima

di RKUD telah disalurkan ke RKD;

2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian output paling kurang sebesar 50%. Capaian output paling kurang sebesar 50% dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa.

Penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud di atas berlaku mulai tahun 2018. Untuk tahun 2017, ditentukan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan selanjutnya untuk Tahap II disampaikan ke KPPN.

Dalam hal Bupati/Walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I sampai dengan bulan Juli dan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

#### **2.2.1.2 Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25

yang bunyinya sebagaimana berikut:

a. Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

b. Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

c. Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDDesa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Wali kota memastikan pengalokasian

Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

a. Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

b. Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

1. Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan ;dan
2. Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan Dana Desadisusun

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ([www.Kemendes.go.id](http://www.Kemendes.go.id)).

### **2.2.2 Desentralisasi Fiskal**

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik agar tercipta kemudahan kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam Rochjadi, (2004).

Dalam teori ekonomi publik dibahas mengenai berbagai permasalahan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan pusat. Musgrave menjelaskan tentang ketiga fungsi pokok pemerintahan yang terdiri dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Musgrave terdapat dua faktor yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah secara ekonomi suatu fungsi akan lebih baik dilaksanakan terpusat (sentralisasi) ataukah didesentralisasikan. Faktor yang pertama adalah eksternalitas dan uang, yang kedua ialah preferensi dalam Azwardi & Abukosim, (2007).

Selanjutnya Boex dan Martinez-Vazquez mengemukakan empat pilar desentralisasi fiskal, yaitu melalui desentralisasi fiskal terjadi pelimpahan

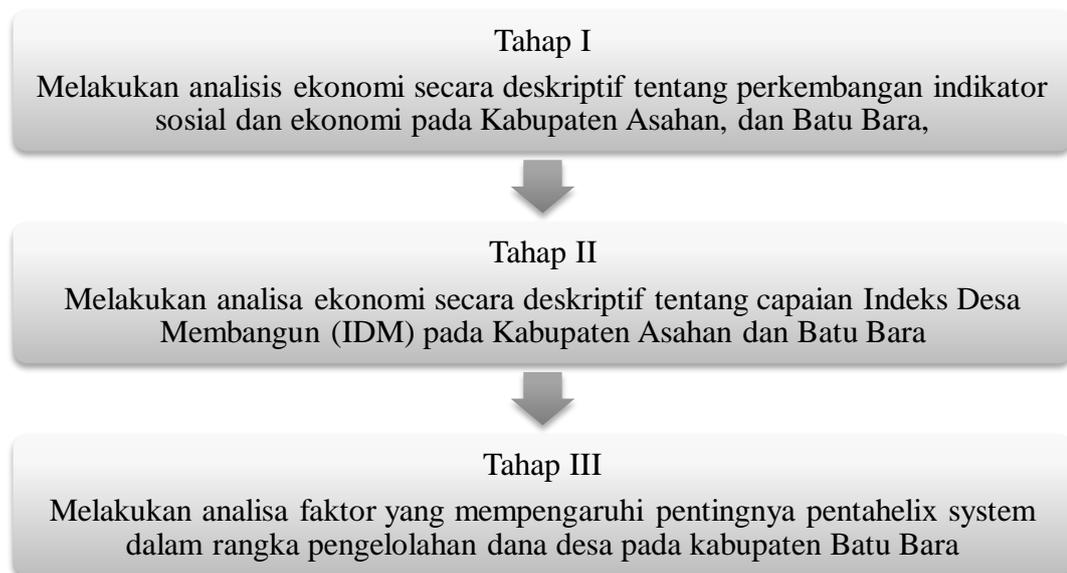
wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, meliputi pengeluaran, penerimaan, transfer, dan pinjaman daerah yang dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dalam Azwardi & Abukosim, (2007).

Pada dasarnya transfer pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dapat dibedakan atas bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan bantuan (*grants*). Adapun tujuan dari transfer ini adalah pemerataan vertikal (*vertical equalization*), pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), mengatasi persoalan efek pelayanan publik (*correcting spatial externalities*), mengerahkan prioritas (*redirecting priorities*), melakukan eksperimen dengan ide- ide baru, stabilisasi dan kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum (SPM) di setiap daerah dalam Hermawan, (2007).

Di dalam peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2013 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah, transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

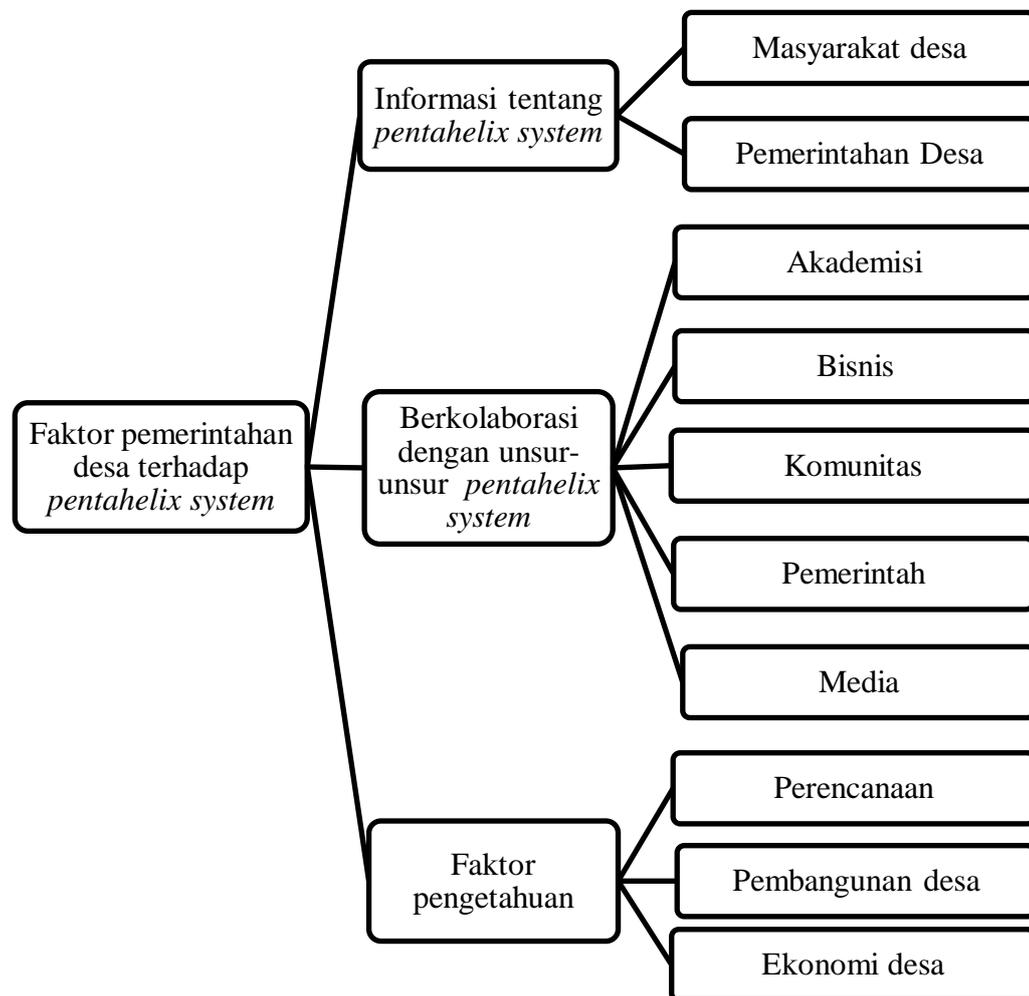
## 2.3 Kerangka Penelitian

### 2.3.1 Kerangka Konseptual Penelitian



**Gambar2.4 Kerangka Konseptual**

### 2.3.2 Kerangka Model Analisa Faktor



**Gambar 2.5** Bagan Kerangka Model Analisa faktor

Dalam model ini, faktor informasi tentang *Pentahelix System*, berkolaborasi dengan unsur-unsur *Pentahelix System*, faktor pengetahuan merupakan variabel bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap faktor Pemerintah Desa terhadap *Pentahelix System* seluruh Desa di wilayah Kabupaten Batu Bara yang merupakan variabel terikat.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah riset kuantitatif, yang dimana bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah masalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat verbal dan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan bilangan. Data yang akan disajikan adalah data data *time series* yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Data yang akan dihimpun mencakup wilayah di Indonesia.

#### 3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel yang diamati adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 1**

#### Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data
Informasi tentang pentahelix system	Masyarakat desa	Merupakan kelompok orang yang bertempat tinggal wilayah desa, pada umumnya mata pencaharian utama penduduknya adalah petani atau nelayan.	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a> , <a href="http://www.kemenkopmk.go.id">www.kemenkopmk.go.id</a> , <a href="http://www.djkn.kemenkeu.go.id">www.djkn.kemenkeu.go.id</a>
	Pemerintah desa	Lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.	

Berkolaborasi dengan unsur-unsur pentahelix system	Akademisi	Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan	<a href="http://www.djkn.kemenkeu.go.id">www.djkn.kemenkeu.go.id</a> , <a href="http://www.kemenkopmk.go.id">www.kemenkopmk.go.id</a>
	Bisnis	Bisnis merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan	
	Komunitas	Dalam hal ini komunitas merupakan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan bisnis yang berkembang. Bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan	
	Pemerintah	Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus berperan sebagai controller yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan bisnis	
	Media	Media berperan dalam mendukung publikasi dalam promosi dan membuat brand image.	
Faktor pengetahuan	Perencanaan	Proses perencanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, indeks pembangunan desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan pengalokasian dana desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa	<a href="http://www.djkn.kemenkeu.go.id">www.djkn.kemenkeu.go.id</a> , <a href="http://www.kemenkopmk.go.id">www.kemenkopmk.go.id</a>
	Pembangunan desa	Pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal	

		kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografik, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik.	
	Sosial Ekonomi	Kedudukan orang tua di masyarakat yang dapat diukur dari tingkat pendidikan, penghasilan, kepemilikan barang berharga kekuasaan atau jabatan sosial dimasyarakat.	

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat data seluruh provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dan Batu Bara, yang disediakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)) dan badan Pusat Statistik(BPS) ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

#### 3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan selama 4 bulan yaitu Mei 2022 sampai Agustus 2022.

### 3.4 jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data Kuantitatif dan Kualitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang di ukur dalam skala numerik. Pada umumnya data kuantitatif yang bersifat data nominal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Pada umumnya data kualitatif yang bersifat data ordinal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat. (Kuncoro, 2013)

### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu dapat dengan melakukan penelitian langsung berupa menyebarkan kuesioner, wawancara langsung kepada para pengguna. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013).

Sumber data yang diperoleh langsung dari hasil publikasi yang berasal dari website-website resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), dengan objek penelitian kabupaten Asahan dan Batu Bara.

## **3.5 Populasi dan Sampel**

### **3.5.1 Populasi**

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. (Kuncoro, 2013)

Dalam penelitian ini Populasinya yaitu Pemerintah Desa yang berada pada wilayah pantai timur Sumatera utara, kabupaten Asahan, dan Batu Bara,

### **3.5.2 Sampel**

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan ialah Non Probability sampling, pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (daerah) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel ini meliputi, simple random, proportionate stratified random, disproportionate stratified random dan area (cluster) sampling. Karena obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalkan penduduk dari suatu negara, kabupaten atau Desa maka digunakan teknik cluster sampling. Analisis cluster adalah istilah yang diberikan pada sebuah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi objek atau individu yang serupa dengan memperhatikan beberapa kriteria. Tujuan utama analisis cluster adalah untuk

menggolongkan individu atau objek yang berhubungan secara mutually exclusive ke dalam jumlah yang lebih kecil. (Kuncoro, 2013)

Tujuan dibentuknya sampel dalam penelitian adalah untuk mempelajari karakteristik suatu populasi, karena tidak dimungkinkannya penelitian melakukan penelitian populasi karena jumlah populasi yang sangat besar, keterbatasan waktu atau hambatan lainnya.

Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} \dots\dots\dots(3-1)$$

Dimana:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Presentase derajat kesalahan yang masih bisa ditolerir

Pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan ( misalnya 1%, 5%, 10%)

Dengan rumus tersebut maka diperoleh jumlah sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{141}{1 + 141 (0,15)^2} = 58$$

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 58 aparaturnya atau pegawai desa.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data melalui website-website resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), yang berupa data silang tempat (*cross section*) dengan objek penelitian 5 Kabupaten di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara dan juga data runtut waktu (*time series*). Kemudian penelitian kepustakaan (*library research*) juga dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat menunjang dan dapat digunakan sebagai tolak ukur pada penelitian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji literatur-literatur yang tersedia seperti buku, jurnal, dan artikel yang menyangkut Pengelolaan Dana Desa dan Peningkatan Perekonomian Daerah. Melakukan observasi lapangan, serta teknik dengan membagikan kuesioner dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan kepada responden secara langsung.

### **3.7 Teknik Analisis Tujuan Penelitian**

#### **3.7.1 Analisis Ekonomi Deskriptif Perkembangan Indikator Sosial Dan Ekonomi Pada Kabupaten Asahan, dan Batu Bara**

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian.

Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan indikator sosial dan ekonomi pada Kabupaten yaitu Asahan dan Batu Bara, dan juga untuk mengetahui bagaimana persepsi pemerintahan desa terhadap *pentahelix system* dalam perencanaan pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Batu Bara.

### 3.7.2 Melakukan Analisa Ekonomi Secara Deskriptif Tentang Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Pada Kabupaten Asahan Dan Batu Bara

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kebijakan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Desa (IDM).

### 3.7.3 Model Analisis Faktor

Analisa faktor merupakan metode analisis multivariat yang didasarkan pada korelasi antar variabel. Analisa faktor termasuk salah satu teknik statistika yang dapat digunakan untuk memberikan deskripsi yang relatif sederhana melalui reduksi jumlah variabel yang disebut faktor.

Analisa faktor merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mereduksi dan meringkas data. Analisa faktor dalam analisis multivariate tergolong analisis interdependensi (*interdependence technique*) dimana seluruh set hubungan yang interdependen diteliti. Variabel yang berada dalam satu kelompok akan memiliki korelasi yang tinggi sedangkan variabel yang berbeda kelompok akan memiliki korelasi yang rendah.

Analisis faktor dipergunakan dalam kondisi sebagai berikut :

1. Mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari (*underlying dimensions*) atau faktor, yang menjelaskan korelasi antara suatu set variabel.
2. Mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel baru yang tidak berkorelasi (*independent*) yang lebih sedikit jumlahnya.

3. Menggantikan suatu set variabel asli yang saling berkorelasi di dalam analisis multivariat selanjutnya.
4. Mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel yang penting dari suatu set variabel yang lebih banyak jumlahnya untuk dipergunakan dalam analisis multivariat selanjutnya.

Jika vektor acak (*random vector*)  $X = X_1, X_2, X_3, \dots, X_p$  mempunyai vektor rata-rata  $\mu$  dan matriks ragam peragam  $\Sigma$ , secara linear bergantung pada sejumlah faktor yang tidak teramati  $F_1, F_2, F_3, \dots, F_m$  yang disebut faktor umum (*common factor*) dan  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_p$  yang disebut faktor khusus (*specific factors*).

Maka model dari analisis faktor adalah :

$$X_1 - \mu_1 = l_{i1} F_1 + l_{i2} F_2 + \dots + l_{im} F_m + \varepsilon_i$$

$$X_2 - \mu_2 = l_{i2} F_1 + l_{i2} F_2 + \dots + l_{im} F_m + \varepsilon_i$$

Dan jika dituliskan kedalam notasi matriks, maka bentuknya sebagai berikut :

$$X_{(px1)} - \mu = l_{(pxm)} F_{(mx1)} + \varepsilon_p$$

Keterangan :

$X$  : vektor variabel asal

$\mu$  : vektor rata-rata variabel asal

$l$  : matrik loading factor

$F$  : vektor faktor bersama

$\varepsilon$  : vektor faktor spesifik

Adapun model analisis faktor dalam penelitian ini sebagai berikut :

Faktor pentahelix system  $i = l_{i1}$  informasi pentahelix system  $j + l_{i2}$  berkolaborasi unsur pentahelix system  $j + l_{i2}$  faktor pengetahuan  $j + \varepsilon_i$

Dimana :

Faktor pentahelix system : Vektor variabel asal yang memiliki  $p$  komponen pada pengamatan ke- $i$ .

Informasi pentahelix system : Faktor bersama (*common factor*) yang ke- $j$ .

Berkolaborasi unsur pentahelix system : Faktor bersama (*common factor*) yang ke- $j$ .

Faktor pengetahuan : Faktor bersama (*common factor*) yang ke- $j$ .

$l_{ij}$  : Bobot faktor (*factor loading*) dari peubah ke- $i$  dan faktor ke- $j$ .

$\varepsilon_i$  : Sisaan atau *error* dari peubah ke- $i$  (*specific factor*)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 . Gambaran Umum Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara**

##### **4.1.1. Kondisi Geografis**

###### **4.1.1.1 Letak**

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 10 - 40 Lintang Utara dan 980 - 1000 Bujur Timur, Provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain: di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, di sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/ kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur, Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjung balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binja



**Gambar 4.1** Peta Wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara ([www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id))

Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72,981,23 km<sup>2</sup>, sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai Pulau Sumatera, Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6,262,00 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6,134,00 km<sup>2</sup> atau 8,40 persen, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6,030,47 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,26 persen, Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara,

**Tabel 4.1****Luas Daerah Menurut Kabupaten Di Wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara**

Kabupaten	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase %
Asahan	3 702.21	5,07
Batu Bara	922,20	1,26
Serdang Bedagai	1900.22	2,60
Deli Serdang	2 241.68	3,07
Sumatera Utara	72 981.23	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara ([www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id))

Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72,981,23 km<sup>2</sup>, sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai Pulau Sumatera, Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6,262,00 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6,134,00 km<sup>2</sup> atau 8,40 persen, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6,030,47 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,26 persen, Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara,

Berdasarkan luas wilayah menurut Kabupaten di wilayah pantai timur Provinsi Sumatera Utara yang luas terbesar adalah Kabupaten Asahan dengan luas 3.702.21 km<sup>2</sup> atau sekitar 5,07 persen dari total luas provinsi sumatera utara, diikuti Kabupaten Deli Serdang dengan luas 2.241.68 Km<sup>2</sup> atau 3,07 persen. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas 1.900.22 km<sup>2</sup> atau sekitar 2,60 persen dan diikuti oleh Kabupaten Batu Bara paling sedikit diantara 4 kabupaten tersebut sekitar 922,20 km<sup>2</sup> atau sekitar 1,26 persen dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Rata-rata luas wilayah Pantai timur Provinsi Sumatera utara digunakan untuk lahan perkebunan kelapa sawit.

#### 4.1.1.2. Topografis

Kondisi topografi di wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara sebagian besar berupa dataran rendah dengan ketinggian yang relatif bervariasi berkisar antara 0-3000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah Kabupaten Asahan merupakan daerah ke 2 tertinggi di wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara dengan ketinggian mencapai 1000 mdpl sedangkan wilayah Kabupaten Batu Bara merupakan daerah dengan ketinggian sekitar 50 mdpl. Ketinggian Setiap wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**

#### **Tinggi Wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021**

<b>Kabupaten</b>	<b>Tinggi Wilayah (mdpl)</b>
Asahan	1000
Batu Bara	50
Serdang Bedagai	500
Deli Serdang	500

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara ([www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id))

Kondisi Topografi Kabupaten Asahan memiliki tinggi daerah di atas permukaan laut sebesar 1000 mdpl, artinya kabupaten Asahan berada di daerah perbukitan. Sehingga dataran tersebut banyak digunakan untuk lahan baik perkebunan maupun pertanian. Dan mayoritas pekerjaan masyarakat Kabupaten Asahan adalah sebagai petani dan bekerja diperusahaan perkebunan.

#### 4.1.1.3. Iklim

Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Provinsi Sumatera Utara tergolong ke dalam daerah beriklim tropis, Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian,

Sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan, Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, diantara kedua musim itu terdapat musim pancaroba,

Sumatera Utara juga termasuk ke dalam daerah yang sering mengalami kejadian gempa bumi, Sepanjang 2019 tercatat sebanyak 528 kali kejadian gempa bumi, Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 dimana tercatat gempa bumi terjadi sebanyak 356 kali,

#### **4.1.2. Kondisi Demografis di Wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara**

##### **4.1.2.1. Jumlah Penduduk**

Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 2020 penduduk keadaan tanggal September 2020 berjumlah 14.799.361 jiwa. Sementara itu hasil sensus penduduk sebelumnya pada tahun 2010 mencapai 12.982.204 jiwa. Berikut tabel rician jumlah penduduk di wilayah pantai timur provinsi sumatera utara :

**Tabel 4.3**

#### **Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara Di 4 Kabupaten Tahun 2021 (Jiwa)**

No	Kabupaten	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Asahan	393 392	384 234	777 626
2	Batu Bara	333 515	328 561	413 171
3	Serdang Bedagai	328 561	333 515	662 076
4	Deli Serdang	977 039	964 335	1 941 374
5	Sumatera Utara	7 492 973	7 443 175	14 936 148

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara ([www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id))

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di wilayah pantai timur provinsi sumatra utara pada tahun 2021 tercatat 14 936 148 jiwa dengan rincian 7 492 973 jiwa penduduk laki-laki dan 7 443 175 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbesar berada pada Kabupaten deli Serdang sebanyak 1 941 374 jiwa, diikuti dengan kabupaten Asahan sebanyak 777 626 jiwa. jumlah penduduk Kabupaten serdang Bedagai sebesar 662 076 jiwa, sedangkan jumlah Kabupaten Batu Bara sebanyak 413 171 jiwa penduduk laki laki 333 515 jiwa dan 328 561 jiwa penduduk perempuan pada tahun 2021.

#### 4.1.2.2. Tenaga Kerja

**Tabel 4.4**

**Jumlah Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas Menurut 4 Kabupaten Di Wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara (Jiwa) 2017-2021**

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
1	Asahan	315.518	336.894	327.216	317.794	340.015
2	Batu Bara	183.117	194.926	184.388	208.595	214.289
3	Serdang Bedagai	285.577	292.749	305.205	314.818	302.722
4	Deli Serdang	971.762	1.066.470	1.063.161	1.125.931	1.147.063
5	Sumatera Utara	6.743.277	7.124.458	7.063.662	7.350.057	7.511.006

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara ([www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id))

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja di wilayah pantai timur provinsi sumatra Utara Tahun 2017 sebesar 6.743.277 jiwa. Pada tahun 2018 meningkat sebesar 7.124.458 jiwa, sedangkan padatahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7.063.662 jiwa pada tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2020 dan 2021 meningkat kembali sebesar 7.511.006 jiwa. Kabupaten dengan jumlah angkatan kerja terbesar yaitu Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan sebesar 1.147.063 jiwa, diikuti dengan Kabupaten Asahan dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan pada tahun 2017 sebesar 315.518 jiwa. Sedangkan menurun terus dari tahun 2018-2020 sebesar 194.926-317.794 jiwa. Sedangkan pada tahun 2021 naik kembali sebesar 340.015 jiwa. Sedangkan

Kabupaten dengan jumlah angkatan kerja paling sedikit yaitu Kabupaten Batu bara diantara 4 Kabupaten tersebut pada tahun 2021 sebesar 214.289 jiwa.

#### 4.1.3. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan daerah tersebut, terjadinya pertumbuhan PDRB suatu daerah dapat disebabkan dari meningkatnya kontribusi salah satu subsektor yang ada di daerah tersebut. Berikut ini tabel PDRB menurut wilayah di pantai timur provinsi Sumatera utara.

**Tabel 4.5**  
**PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Berlaku Dan Harga Konstan 2010 Di 4 Kabupaten Di Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara (Milyar Rupiah) Tahun 2021**

No	Kabupaten	PDRB atas dasar harga berlaku	PDRB atas dasar Konstan
1	Asahan	41.994	27.280
2	Batu Bara	37.198	24.486
3	Serdang Bedagai	30.419	19.863
4	Deli Serdang	115.306	72.174
5	Sumatera Utara	859.871	547.652

Sumber :Badan Pusat Statistik BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat perekonomian di wilayah Pantai Timur Sumatera utara yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai Rp. 859.971 milyar, sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan mencapai Rp. 547.652 milyar. PDRB terbesar dari 4 kabupaten diatas yaitu Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 115.306 milyar yang di dominasi tiga lapangan usaha yaitu :

industri pengolahan, sebesar 36.222.42 miliar, perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20.506.53 miliar serta pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12.214.16 miliar. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut mencapai 68.943.11 miliar terhadap total PDRB kabupaten deli serdang.

Yang kedua yaitu Kabupaten Asahan dengan jumlah PDRB sebesar Rp.41.994 miliar yang didominasi oleh Tiga lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB Kabupaten Asahan pada tahun 2021 yaitu: pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 15.920.46 miliar, industri pengolahan sebesar 9.681.56 miliar, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8.175.11 miliar.

Dan yang ketiga yaitu Kabupaten Batu Bara dengan jumlah PDRB sebesar Rp.37.198 miliar yang didominasi oleh Tiga lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB Kabupaten Batu Bara pada tahun 2021 yaitu: industri pengolahan sebesar 17.007.75 miliar, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 7.533.00 miliar, dan perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6.653.31 miliar,

Sedangkan penyumbang PDRB sedikit di 4 wilayah pantai timur provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp.30.419 miliar yang didominasi tiga kategori utama yang masih mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2021 yaitu Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 11.938.50 miliar, industri pengolahan sebesar 5.784.27 miliar, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4.999.50 miliar.

**Tabel 4.6**

**Struktur Ekonomi PDRB lapangan usaha di wilayah patai timur provinsi sumatera utara 2021 (miliyar rupiah)**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>2021</b>
1	Asahan	A. Pertanian, kehutanan dan perikanan	15.920.46
		B. Industri pengolahan	9.681.56
		C. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	8.175.11
2	Batu Bara	A. Industri Pengolahan	17.007.75
		B. Pertanian, kehutanan dan perikanan	7.533.00
		C. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	6.653.31
3	Serdang Bedagai	A. Pertanian, kehutanan dan perikanan	11.938.50
		B. Industri pengolahan	5.784.27
		C. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4.999.50
4	Deli serdang	A. Industri Pengolahan	36.222.42
		B. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	20.506.53
		C. Pertanian, kehutanan dan perikanan	12.214.16

sumber :Badan Pusat Statistik BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa struktur ekonomi penyumbang PDRB terbesar di 4 kabupaten wilayah pantai timur provinsi sumatera utara di dominasi oleh sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor, dan industri pengolahan.

Jika dilihat di wilayah pantai timur provinsi sumtera utara merupakan salah satu sektor pariwisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan, seharusnya sektor akomodasi sudah dapat menjadi penyumbang PDRB terbesar untuk wilayah pantai timur provinsi sumatera utara, padahal sektor itu merupakan potensi dan dapat dikembangkan. Pengembangan wilayah pantai timur provinsi sumatera utara sebagai destinasi pariwisata selain ditujukan untuk mendorong upaya konservasi keragaman geologi,

keanekaragaman hayati dan budaya, juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga wisatawan yang datang tidak hanya melihat pesisir saja.

#### 4.1.4 Kondisi Sosial

##### 4.1.4.1 Kemiskinan

**Tabel 4.7**

**Jumlah Penduduk Miskin di 4 Kabupaten Wilayah Pantai timur Sumatera utara  
2021**

No	Kabupaten	Jumlah penduduk Miskin (jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Asahan	83.67	74.14	70.53	66.32	69.29
2	Batu Bara	50.91	51.78	50.46	49.78	52.59
3	Serdang Bedagai	56.93	50.49	48.69	49.18	51.16
4	Deli Serdang	97.09	88.52	84.94	86.26	92.52
5	Sumatera utara	1 453.87	1 324.98	1 282.04	1.283.29	1 343.86

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera utara ([www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id))

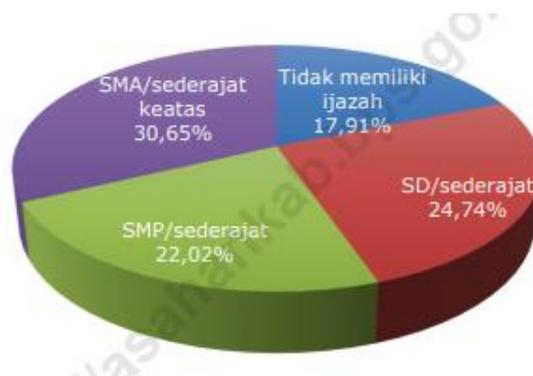
Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah pantai timur provinsi sumatera utara tahun 2021 sebesar 1 343.86 jiwa terhadap total penduduk wilayah pantai timur provinsi sumatera utara. Jumlah penduduk miskin terbesar berada pada Kabupaten deli serdang tapi setiap tahun penduduk miskin menurun tahun 2017 sebesar 97.09 dan pada tahun 2021 makin sedikit sebanyak 92.52 jiwa. diikuti dengan Kabupaten asahan pada tahun 2017 sebanyak 83.67 jiwa dan pada tahun 2021 makin sedikit sebanyak 69.29 jiwa, dan Kabupaten batu bara sebanyak 50.91 jiwa pada tahun 2017 tetapi adanya naik turun disetiap tahun, meningkat pada tahun 2021 sebanyak 52.59 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten serdang bedagai sebesar 56.93 jiwa pada tahun 2017 sedangkan pada tahun 2018,2019,2020 menurun tetapi naik kembali pada tahun 2021 sebanyak 51.16 jiwa.

Dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1.356,72 ribu jiwa atau sebesar 9,14 persen terhadap total penduduk. Jumlah

penduduk miskin tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan pada bulan September 2019. Tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 1.260,50 ribu jiwa atau sebesar 8,63 persen pada September 2019, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 96,22 ribu jiwa hingga September 2020 dan peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,51 poin.

#### 4.14.2. Pendidikan

Upaya pembangunan sektor pendidikan di kabupaten asahan dan batu bata terus dilakukan baik dengan penyediaan/peningkatan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru PNS dan guru honorer yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah setiap tingkatan pendidikan maupun mutu/kualitasnya.



**Gambar 4.2 Grafik Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas di Kabupaten Asahan Tahun 2021**

Sumber : [www.asahankab.bps.go.id](http://www.asahankab.bps.go.id)

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa di Kabupaten Asahan masih terdapat 17,91 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas yang pernah sekolah tetapi pada kenyataannya tidak/belum tamat SD. Modus tingkat pendidikan tertinggi adalah Tamatan SMA/ sederajat ke atas sebanyak 30,65 persen. Disusul dengan tamatan SD/ sederajat sebanyak 24,74 persen, dan tamatan SMP/ sederajat sebanyak 22,02 persen.

Apabila penduduk yang minimal telah tamat pendidikan SMA/ sederajat dikatakan berpendidikan tinggi, maka pada tahun 2021 terdapat 30,65 persen penduduk 10 tahun ke atas Kabupaten Asahan yang tingkat pendidikan SMA/ sederajat ke atas (SMA/ sederajat dan Sarjana).



**Gambar 4.3 Grafik Perkembangan HLS dan RLS Kabupaten Batu Bara, 2017-2021**

Sumber : [www.batubarakab.bps.go.id](http://www.batubarakab.bps.go.id)

Sampai dengan tahun 2021, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Batu Bara telah mencapai 8,07 tahun atau setara dengan SLTP kelas 2. Sementara anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 12,64 tahun atau mencapai Diploma I. Perkembangan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Batu Bara selama lima tahun terakhir secara umum terus meningkat. Pada tahun 2017, HLS di Batu Bara sebesar 12,49 tahun secara konsisten terus meningkat menjadi 12,64 tahun pada tahun 2021. Demikian juga dengan RLS, pada tahun 2017 sebesar 7,83 tahun meningkat hingga 8,07 tahun pada tahun 2021. Ratarata pertumbuhan HLS sebesar 1,22 persen per tahun, lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata lama sekolah yang tumbuh 1,13 persen per tahun. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya, angka rata-rata lama sekolah di Batu Bara berada di peringkat ke 5 terendah se Sumatera Utara. Capaian bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan.

#### 4.1.4.3 Kesehatan

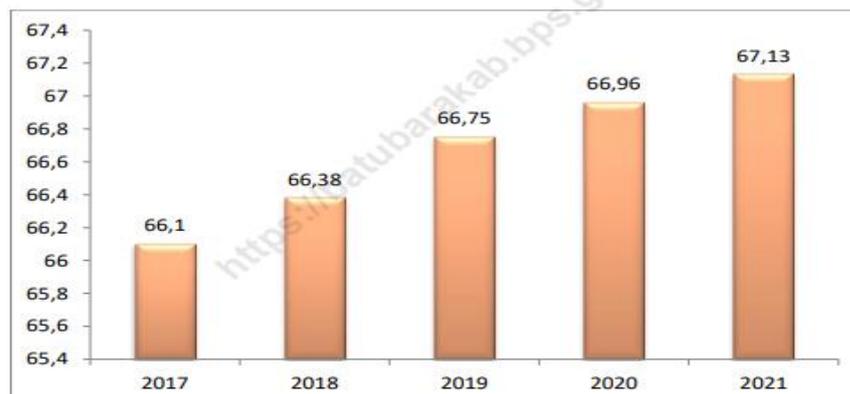


**Gambar 4.4 Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup Di Kabupaten Asahan Tahun 2017-2021**

Sumber : [www.asahankab.bps.go.id](http://www.asahankab.bps.go.id)

Angka harapan hidup merupakan indikator yang menggambarkan berapa lama seorang bayi baru lahir diharapkan hidup. Angka harapan hidup yang terus bertambah akan menunjukkan hasil dari peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa AHH Kabupaten Asahan perlahan mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2017 AHH sebesar 67,57 tahun, kemudian meningkat menjadi 67,79 tahun pada tahun 2018, meningkat menjadi 68,11 tahun pada tahun 2019, 68,26 tahun pada tahun 2020 dan 68,37 tahun pada tahun 2021. Artinya, setiap bayi yang lahir di Kabupaten Asahan diharapkan bisa bertahan hidup hingga mencapai umur 69 tahun. Kecenderungan meningkatnya AHH ini ditunjang oleh peningkatan pelayanan kesehatan serta peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga mengurangi resiko kematian penduduk.



**Gambar 4.5 Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup Batu Bara, 2017-2021**

Sumber : [www.batubarakab.bps.go.id](http://www.batubarakab.bps.go.id)

Angka Harapan Hidup (AHH) dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat, diharapkan kesempatan untuk bertahan hidup akan semakin besar. Sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Angka harapan hidup berbanding terbalik dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin rendah angka kematian bayi maka angka harapan hidup akan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya.

Gambar 4.5 memperlihatkan perkembangan AHH Batu Bara selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada gambar tersebut terlihat bahwa AHH Batu Bara selama periode 2017-2021 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin bertambah. AHH Batu Bara pada tahun 2021 mencapai 67,13 tahun. Berarti setiap bayi di Batu Bara yang dilahirkan pada tahun 2021, dapat berharap untuk hidup sampai usia 67 sampai 68 tahun. Selama tahun 2017-2021, angka harapan hidup saat lahir di Batu Bara tumbuh rata-rata 0,35 persen per tahun. Namun AHH Batu Bara masih lebih rendah dibanding AHH Sumatera Utara yakni 69,23 tahun.

Salah satu yang menentukan angka harapan hidup adalah kematian bayi. Resiko kematian bayi lebih besar bagi bayi yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi,

dibandingkan dengan ibu yang memiliki gizi cukup. Pada umumnya kekurangan gizi berkorelasi positif dengan keadaan sosial ekonomi yang rendah. Penyebab tingginya angka kematian bayi selain karena masalah infeksi/penyakit dan berat bayi lahir rendah, juga berkaitan erat dengan kondisi pada saat hamil, pertolongan kelahiran yang aman dan perawatan bayi pada saat dilahirkan.

**Tabel 4.8**

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah pantai timur provinsi Sumatera utara 2017-2021**

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
1	Asahan	64.10	69.49	69.92	70.29	70.49
2	Batu bara	67.20	67.67	68.35	68.36	68.58
3	Serdang Bedagai	69.16	69.69	70.21	70.24	70.56
4	Deli Serdang	73.94	74.92	75.43	75.44	75.53

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera utara ([www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id))

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah pantai timur provinsi Sumatera utara terus mengalami kemajuan selama periode 2017 sampai 2021. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Asahan meningkat signifikan dari 64.10 pada tahun 2017 menjadi 70.49 pada tahun 2021. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi berada pada Kabupaten Deli Serdang sebesar 75.53. IPM Sumatera utara menunjukkan kemajuan yang besar. Indeks Pembangunan manusia Sumatera utara masih berstatus “sedang”. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah pada Tahun 2020 di 4 kabupaten wilayah pantai timur provinsi Sumatera utara berada pada Kabupaten Batu Bara sebesar 68,58.

Dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Utara, pembangunan manusia Sumatera Utara terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2020. IPM Sumatera Utara meningkat dari 67,09 pada tahun 2010 menjadi 71,77 pada tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM Sumatera Utara rata-rata tumbuh

sebesar 0,68 persen per tahun. IPM Sumatera Utara menunjukkan kemajuan yang cukup besar, status pembangunan manusia Sumatera Utara mengalami peningkatan. Pembangunan manusia Sumatera Utara telah berstatus “tinggi” mulai tahun 2016.

Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Pada tahun 2020 IPM Indonesia mencapai 71,94, tumbuh sebesar 0,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, status pembangunan manusia di Indonesia masih berada pada level tinggi (berada pada kisaran antara  $70 \leq \text{IPM} < 80$ ). Pertumbuhan IPM tahun 2020 jauh melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 0,74 persen. Selama periode 2010- 2019, pembangunan manusia di Indonesia setiap tahunnya rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun. Tetapi dengan pertumbuhan pada tahun 2020 yang melambat tersebut, rata-rata pertumbuhan IPM 2010-2020 menjadi sebesar 0,78 persen per tahun.

Dengan demikian, pembangunan manusia di wilayah pantai timur provinsi Sumatera Utara yang berstatus “sedang” masih berada dibawah provinsi Sumatera Utara yang berstatus “tinggi” dan dibawah Nasional yang juga berstatus “tinggi”.

#### **4.2. Melakukan Analisa Ekonomi Secara Deskriptif Tentang Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Di Kabupaten Asahan Dan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 - 2021**

Indeks Desa Membangun (IDM) yang dibangun oleh Kemendesa PDTT merupakan indeks yang memetakan status perkembangan desa yang memperhatikan karakteristiknya. Indeks ini digunakan sebagai instrumen untuk melakukan targeting dalam pencapaian IKU Kementerian Desa, PDTT 2015-2019.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan

Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pengakuan dan penghormatan Negara kepada Desa yang disertai dengan redistribusi sumberdaya dan kewenangan pembangunan secara penuh sebagaimana mandat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, memberikan tanda yang jelas bahwa dari situlah Desa harus menjadi tumpuan untuk membangun Indonesia. Disebutkan Menteri Desa, "IDM ini lebih komperhensif jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD), karena IDM ini mengedepankan pendekatan yang bertumpu kepada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi, tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal" guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada guna mengurangi angka kemiskinan.

Dalam konteks tipologi desa, Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: "(i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri". Dari kelima klasifikasi tersebut

maka kini statrata desa sudah memiliki beberapa pembagian yang digunakan sebagai indikator atau parameter desa.

Berikut ini nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara 2019 - 2022 sebagai berikut:

**Tabel 4.9**

**Nilai Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Asahan**

No	Kecamatan	Average of nilai 2019	Status Kecamatan	Average of nilai 2020	Status Kecamatan	Average of nilai 2021	Status Kecamatan
1	Aek Kuasan	0.6543	Berkembang	0.6591	berkembang	0.6591	Berkembang
2	Aek Ledong	0.6523	berkembang	0.6573	berkembang	0.6512	Berkembang
3	Aek Songsongan	0.6641	berkembang	0.6443	berkembang	0.6443	Berkembang
4	Air Batu	0.7155	Maju	0.6715	berkembang	0.6715	Berkembang
5	Air Joman	0.6328	berkembang	0.6480	berkembang	0.6487	Berkembang
6	Bandar Pasir mandoge	0.6509	berkembang	0.6457	berkembang	0.6368	Berkembang
7	Meranti	0.6489	berkembang	0.6733	berkembang	0.6733	Berkembang
8	Simpang Empat	0.6394	berkembang	0.6610	berkembang	0.6556	Berkembang
9	Pulau Rakyat	0.6247	berkembang	0.6569	berkembang	0.6575	Berkembang
10	pulo bandring	0.6524	berkembang	0.6548	berkembang	0.6548	Berkembang
11	tinggi raja	0.5607	berkembang	0.6537	berkembang	0.6537	Berkembang
12	sei dadap	0.6400	berkembang	0.6513	berkembang	0.6513	Berkembang
13	Buntu pane	0.6472	berkembang	0.6506	berkembang	0.6506	Berkembang
14	Rahuning	0.6628	berkembang	0.6482	berkembang	0.6482	Berkembang
15	silau laut	0.6965	berkembang	0.6471	berkembang	0.6466	Berkembang
16	setia janji	0.6548	berkembang	0.6466	berkembang	0.6334	Berkembang
17	bandar pulau	0.6057	berkembang	0.6480	berkembang	0.6170	Berkembang
18	teluk dalam	0.6410	berkembang	0.6414	berkembang	0.6414	Berkembang
19	Rawang panca arga	0.6137	berkembang	0.6365	berkembang	0.6365	Berkembang
20	sei kepeng	0.5997	berkembang	0.6233	berkembang	0.6233	Berkembang
21	sei kepeng barat	0.6034	berkembang	0.5984	Tertinggal	0.6544	Berkembang
22	tanjung balai	0.6080	berkembang	0.5953	berkembang	0.5953	Tertinggal
23	sei Kepang timur	0.5499	berkembang	0.5841	berkembang	0.5841	Tertinggal
24	asahan	0.6388	berkembang	0.6454	berkembang	0.6454	Berkembang

Sumber: indeks Desa membangun ([www.idm.kemendesa.go.id](http://www.idm.kemendesa.go.id))

Kabupaten Asahan terdiri dari 25 Kecamatan, 27 Kelurahan, dan 177 Desa. Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Asahan sangatlah pesat, dapat kita lihat dari tabel 4.9 bahwasanya ada 1 Kecamatan yang status atau kategori desanya maju yaitu kecamatan air batu sedangkan 24 kecamatan lainnya termasuk dalam status atau kategori berkembang dan tertinggal. Indeks desa membangun (IDM) pada tahun 2019 kecamatan air batu sebesar 0.7155 dalam kategori desanya maju, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 0.6715 dikategorikan desa berkembang, dan Indeks Desa Membangun (IDM) ada 2 kecamatan dengan status atau kategori desa tertinggal di Kabupaten asahan kecamatan tanjung balai sebesar 0.5499 pada tahun 2019 dengan status berkembang sedangkan pada tahun 2021 sebesar 0.5953 dengan status desanya tertinggal.

**Tabel 4.10**

**Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Di Kabupaten Batu Bara**

No	Kecamatan	Average of nilai 2019	Status Kecamatan	Average of nilai 2020	Status Kecamatan	Average of nilai 2021	Status Kecamatan
1	air batu	0.6549	Berkembang	0.6582	Berkembang	0.6669	Berkembang
2	lima puluh	0.6422	Berkembang	0.6836	Berkembang	0.7033	Berkembang
3	medang deras	0.6486	Berkembang	0.6472	Berkembang	0.6507	Berkembang
4	sei balai	0.6408	Berkembang	0.6866	Berkembang	0.6764	Berkembang
5	sei suka	0.6593	Berkembang	0.7217	Maju	0.7232	Berkembang
6	Talawi	0.6048	Berkembang	0.6119	Berkembang	0.6378	Maju
7	tanjung tiram	0.6052	Berkembang	0.6525	Berkembang	0.6453	Berkembang
8	datuk lima puluh	0.6132	Berkembang	0.6839	Berkembang	0.7414	Maju
9	laut tador	0.6440	Berkembang	0.6616	Berkembang	0.6679	Berkembang
10	lima puluh pesisir	0.6252	Berkembang	0.6195	Berkembang	0.6379	Berkembang
11	nibung gangus	0.6621	Berkembang	0.6140	Berkembang	0.6258	Berkembang
12	Batu bara	0.6364	Berkembang	0.6563	Berkembang	0.6699	Berkembang

Sumber: indeks Desa membangun ([www.idm.kemendesa.go.id](http://www.idm.kemendesa.go.id))

Kabupaten Batubara terdiri dari 12 Kecamatan, 10 Kelurahan, dan 141 Desa. Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Batubara sangatlah pesat, dapat kita lihat dari tabel 4.10 bahwasanya ada 3 Kecamatan yang status atau kategori desanya maju yaitu kecamatan sei suka, talawi dan datuk lima puluh sedangkan 9 kecamatan lainnya termasuk dalam status atau kategori berkembang. Indeks desa membangun (IDM) pada tahun 2019 kecamatan sei suka sebesar 0.6593 dalam kategori desanya berkembang, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0.7217 dikategorikan desa maju, dan Indeks Desa Membangun (IDM) kecamatan talawi sebesar 0.6378 pada tahun 2021 dengan status desa maju, kecamatan datuk lima puluh sebesar 0.7414 pada tahun 2021 dengan status kategori desa maju.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai

dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Oleh karena itu dengan adanya kebijakan Dana Desa yang berdampak dengan Indeks Desa Membangun (IDM) maka melimpahnya sumber daya alam akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan desa di Kecamatan Asahan dan Batu bara juga akan meningkat.

### 4.3. Analisa Faktor

#### 4.3.1. Melakukan Analisa Faktor Yang Memengaruhi Pentingnya *Pentahelix*

##### *System* Dalam Rangka Pengelolaan Dana Desa

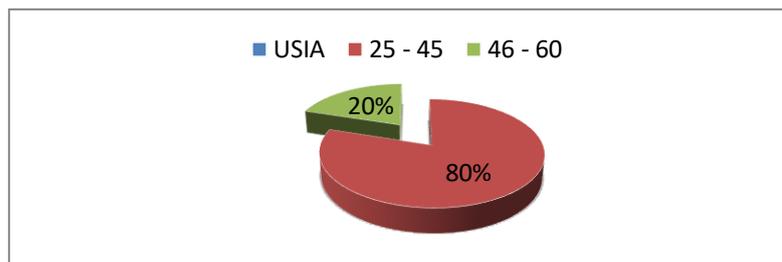
##### 4.3.1.1. Deskriptif Data Responden

Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang disebar kepada Aparatur Pemerintahan Desa di Kantor Desa di Kabupaten Batu bara. Dimana penyebaran kuesioner tersebut dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Jumlah responden yang dipilih yaitu 15 orang dengan sampling 5 desa yang berada di Kabupaten Batu Bara.

##### 4.3.1.1. Data Identitas Responden

Adapun hasil analisis data-data dari identitas responden adalah sebagai berikut :

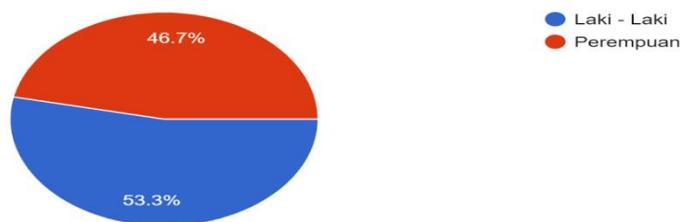
##### 1. Usia



**Gambar 4.6. Usia Responden**

Dari data di atas menunjukkan bahwasanya dari 15 responden kepada aperatur desa, di 5 Desa Kabupaten Batu Bara. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang berusia 25-45 tahun sebanyak 13 responden (80%), untuk responden yang berusia 46-60 tahun ada sebanyak 2 responden (20%), hal ini menunjukkan bahwa kepala aperatur desa di 5 desa kabupaten batu bara yang berkewajiban di desa tersebut.

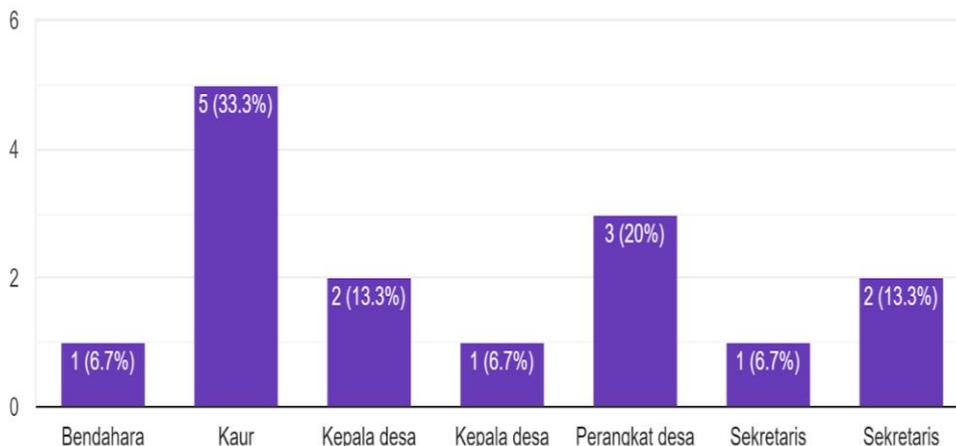
## 2. Jenis Kelamin



**Gambar 4.7. Jenis kelamin Responden**

Dari data di atas menunjukkan bahwasanya dari 15 responden kepada aperatur desa di 5 desa kabupaten batu bara. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang berjenis kelamin Laki-laki ada sebanyak 8 responden, dan responden yang berjenis kelamin perempuan ada sebanyak 7 responden dari jumlah responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas kepada aparatur desa di 5 desa kabupaten batu bara mayoritas berjenis kelamin laki-laki.

### 3. Jabatan



**Gambar 4.8 Jabatan Responden**

Dari data di atas menunjukkan bahwasanya dari 15 responden kepada aparatur desa di 5 desa kabupaten batu bara. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang berkerja sebagai bendahara 1 responden (6,7%) atau yang berkerja sebagai kaur 5 responden (33,3%), untuk responden yang bekerja sebagai kepala desa sebanyak 2 responden (20%), untuk responden yang bekerja sebagai perangkat desa ada sebanyak 3 responden (20%), untuk responden yang bekerja sebagai sekretaris ada sebanyak 3 responden (20%).

#### 4.3.2. Hasil Penelitian Analisa SEM-PLS

##### 4.3.2.1. Convergent Validity

*Convergent validity* adalah salah satu dari pengukuran model pada indikator yang bersifat reflektif. Dimana dilihat dari skor butir pertanyaan dengan skor kontruknya atau melalui *loading factor* pada masing-masing indikator konstruk. Adapun parameter dalam menetapkan bahwa nilai *convergent validity* layak/terpenuhi dapat dilakukan dengan melihat nilai *rule of thumb*, dimana nilai *loading factor* lebih besar dari 0,60 – 0,70, namun dapat juga diterima rentang *loading factor* lebih besar dari 0,50 – 0,60 (Ghozali dan Latan, ali dan Latan, 2012:74). Berdasarkan hasil analisis data pada

*convergent validity* pada indikator-indikator pada masing-masing variabel, dapat dikemukakan sebagai berikut :

### 1. Convergent Validity Faktor Pemerintahan Desa Terhadap Pentahelix System

Indikator konstruk pada variabel faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system berjumlah 4 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.11**

#### Convergent Validity Faktor Pemerintahan Desa Terhadap Pentahelix System

Indikator	Loading Factor	Rule of Thumb	Keterangan
Y.1	0.870	0,70	Memenuhi
Y.2	0.944	0,70	Memenuhi
Y.3	0.446	0,70	Tidak memenuhi
Y.4	0.546	0,70	Tidak memenuhi

*Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS*

Berdasarkan dari data diatas menunjukkan bahwa di dalam variable faktor pemerintah desa terhadap pentahelix system dengan 4 indikator pertanyaan terdapat 2 indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, dengan nilai *loading factor* Y.3 = 0.446 < dari nilai *Rule of Thumb* 0,70 dan Y.4 = 0.546 < dari nilai *Rule of Thumb* 0,70

### 2. Convergent Validity Faktor informasi Tentang Pentahelix System

Indikator konstruk pada variabel faktor informasi tentang pentahelix system berjumlah 4 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.12**  
**Convergent Validity Faktor Informasi Tentang Pentahelix System**

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
X1.1	0.710	0,70	Memenuhi
X1.2	0.697	0,70	Tidak Memenuhi
X1.3	0.584	0,70	Tidak Memenuhi
X1.4	0.450	0,70	Tidak Memenuhi

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variabel faktor Pemerintahan desa terhadap pentahelix system dengan 4 indikator pertanyaan terdapat 3 indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, dengan nilai faktor X1.2 = 0.697 < dari nilai Rule of Thumb 0,70 , X1.3 = 0.584 < dari nilai Rule of Thumb 0,70 , X1.4 = 0.450 < dari nilai Rule of Thumb 0,70.

### 3. Convergent Validity Bekolaborasi dengan Unsur – Unsur *Pentahelix System*

Indikator konstruk pada variabel Penggunaan Teknologi berjumlah 10 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.13**  
**Convergent Validity Bekolaborasi dengan Unsur – Unsur *Pentahelix System***

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
X2.1	0.532	0,70	Tidak memenuhi
X2.2	0.592	0,70	Tidak memenuhi
X2.3	-0.060	0,70	Tidak memenuhi
X2.4	-0.160	0,70	Tidak memenuhi
X2.5	0.287	0,70	Tidak memenuhi
X2.6	-0.106	0,70	Tidak memenuhi
X2.7	0.430	0,70	Tidak memenuhi
X2.8	-0.152	0,70	Tidak memenuhi
X2.9	0.712	0,70	Memenuhi
X2.10	0.792	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable berkolaborasi dengan unsur-unsur pentahelix system dengan 10 indikator pertanyaan

terdapat 2 indikator pertanyaan yang memenuhi kriteria, dengan nilai loading faktor  $X2.9 = 0.712 >$  dari nilai Rule of Thumb 0,70 dan  $X2.10 = 0.792 >$  dari nilai Rule of Thumb 0,70.

#### 4. Convergent Validity Faktor Pengetahuan

Indikator konstruk pada variabel faktor pengetahuan tentang kondisi pentingnya pentahelix system dalam rangka pengolahan dana desa berjumlah indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini :

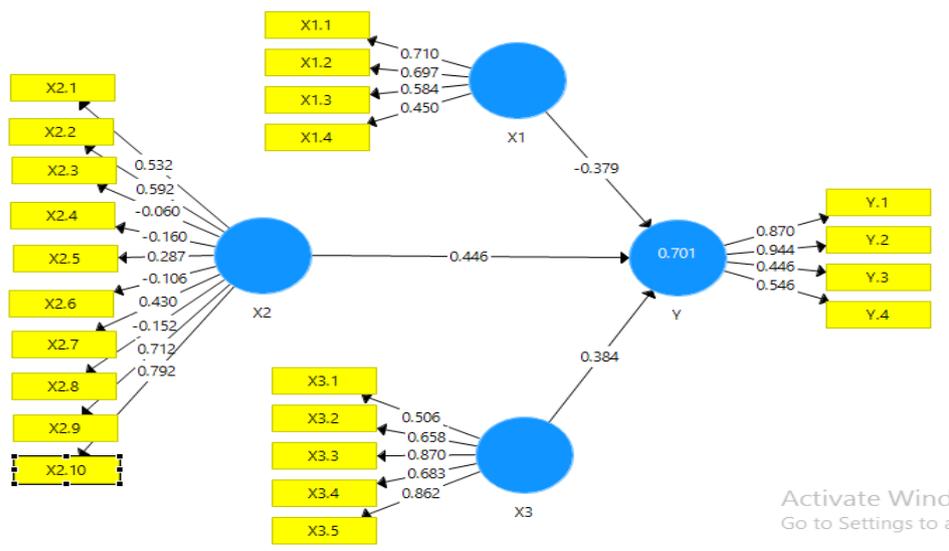
**Tabel 4.14**

#### **Convergent Validity Faktor Pengetahuan**

Indikator	Faktor Loding	Rule Of Thumb	Keterangan
X3.1	0.506	0,70	Tidak Memenuhi
X3.2	0.658	0,70	Tidak Memenuhi
X3.3	0.870	0,70	Memenuhi
X3.4	0.683	0,70	Tidak Memenuhi
X3.5	0.862	0,70	Memenuhi

*Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS*

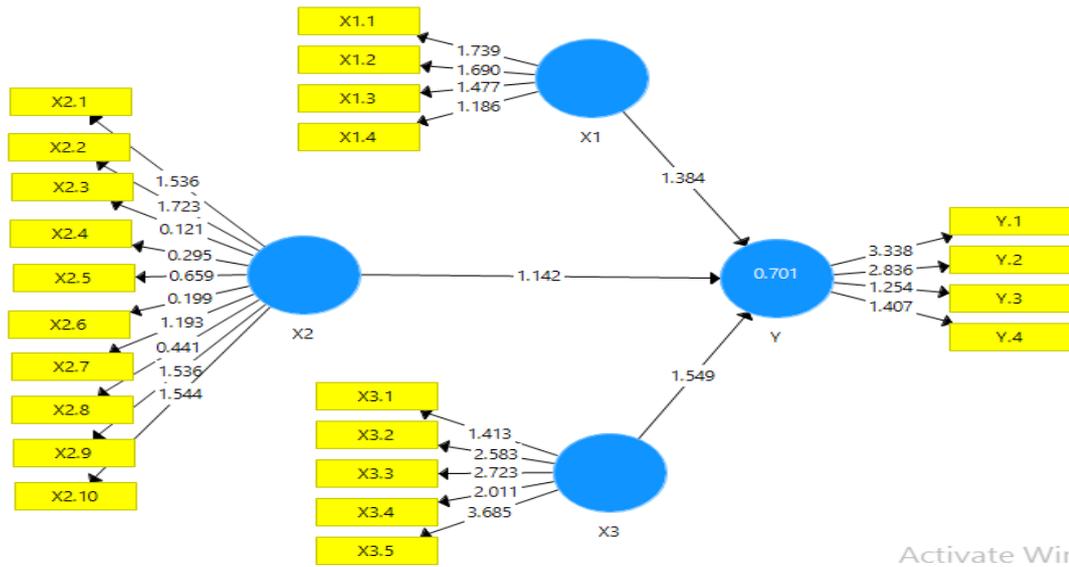
Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable faktor pengetahuan dengan 5 indikator pertanyaan, terdapat 2 indikator pertanyaan yang memenuhi kriteria, dengan nilai loading faktor  $X3.3 = 0.870 >$  dari nilai Rule of Thumb 0,70 dan  $X3.5 = 0.862 >$  dari nilai Rule of Thumb 0,70.



**Gambar 4.9 First Outer Loading**

Berdasarkan tabel convergent validity indikator konstruk pada masing-masing variabel, maka dapat di kemukakan bahwa untuk indikator konstruk pada variabel faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system yang tidak memenuhi nilai loading factor adalah indikator konstruk Y.3 dan Y.4, Variabel faktor informasi tentang pentahelix system yang tidak memenuhi nilai loading factor adalah indikator konstruk X1.2 , X1.3 dan X1.4. Variabel berkolaborasi dengan unsur-unsur pentahelix system yang tidak memenuhi nilai loading factor adalah indikator konstruk X2.1 sampai dengan X2.8, Variabel faktor pengetahuan yang tidak memenuhi nilai loading factor adalah indikator konstruk X3.1, X3.2,X3.4.

Ketentuan dalam analisis convergent validity, jika nilai loading factor tidak terpenuhi maka indikator konstruk dibuang dan dilakukan analisis convergent validity kembali. Adapun hasil analisis convergent validity setelah indikator-indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai loading factor dibuang dapat dikemukakan pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.10 Second Outer Loading

**1. Convergent Validity Faktor Pemerintahan Desa Terhadap Pentahelix System**

Dalam Indikator konstruk pada variabel faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system berjumlah 4 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.15

**Convergent Validity Faktor Pemerintahan Desa Terhadap *Pentahelix System***

Indikator	Loding Factor	Rule of Thumb	Keterangan
Y.1	3.338	0,70	Memenuhi
Y.2	2.836	0,70	Memenuhi
Y.3	1.254	0,70	Memenuhi
Y.4	1.407	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengelolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable faktor pemerintah desa terhadap pentahelix system dengan 4 indikator pertanyaan, Tidak

terdapat indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, semua sesuai dengan nilai loading faktor masing-masing berada diatas dari nilai Rule of Thumb 0,70.

## **2. Convergent Validity Informasi Tentang *Pentahelix System***

Dalam Indikator konstruk pada variabel faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system berjumlah 4 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.16**

### ***Convergent Validity Faktor Informasi Tentang *Pentahelix System****

Indikator	Loading Factor	Rule of thumb	Keterangan
X1.1	1.739	0,70	Memenuhi
X1.2	1.690	0,70	Memenuhi
X1.3	1.477	0,70	Memenuhi
X1.4	1.186	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengelolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable faktor informasi tentang pentahelix system dengan 4 indikator pertanyaan, Tidak terdapat indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, semua sesuai dengan nilai loading faktor masing-masing berada diatas dari nilai Rule of Thumb 0,70.

## **3. Convergent Validity Berkolaborasi Dengan Unsur-Unsur *Pentahelix System***

Dalam Indikator konstruk pada variabel faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system berjumlah 10 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.17

**Convergent Validity Berkolaborasi Dengan Unsur-Unsur *Pentahelix System***

Indikator	Loading Factor	Rule of thumb	Keterangan
X2.1	1.536	0,70	Memenuhi
X2.2	1.723	0,70	Memenuhi
X2.3	0.121	0,70	Tidak Memenuhi
X2.4	0.295	0,70	Tidak Memenuhi
X2.5	0.659	0,70	Tidak memenuhi
X2.6	0.199	0,70	Tidak Memenuhi
X2.7	1.193	0,70	Memenuhi
X2.8	0.441	0,70	Tidak Memenuhi
X2.9	1.536	0,70	Memenuhi
X2.10	1.544	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengelolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable berkolaborasi dengan unsur-unsur pentahelix system dengan 10 indikator pertanyaan terdapat 5 indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, dengan nilai loading faktor X2.3 = 0,121 < dari nilai Rule of Thumb 0,70, X2.4 = 0295 < dari nilai Rule of Thumb 0,70, X2.5 = 0.659 < dari nilai Rule of Thumb 0,70, X2.6 = 0.199 < dari nilai Rule of Thumb 0,70 dan X2.8 = 0.441 < dari nilai Rule of Thumb 0,70.

#### 4. Convergent Validity Faktor Pengetahuan

Dalam Indikator konstruk pada variabel faktor pengetahuan berjumlah 5 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.18

**Convergent Validity Faktor Pengetahuan**

Indikator	Loading Factor	Rule of thumb	Keterangan
X3.1	1.413	0,70	Memenuhi
X3.2	2.583	0,70	Memenuhi
X3.3	2.723	0,70	Memenuhi
X3.4	2.011	0,70	Memenuhi
X3.5	3.685	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengelolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable faktor informasi tentang pentahelix system dengan 4 indikator pertanyaan, Tidak terdapat indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, semua sesuai dengan nilai loading faktor masing-masing bearada diatas dari nilai Rule of Thumb 0,70.

#### 4.3.2.2. Discriminante validity

Dalam analisis *discriminant validity* dimana model pengukuran pada masing-masing indikator konstruk bersifat reflektif dilakukan dengan cara melihat nilai *cross loading* pada masing-masing variabel. Dalam pengujian *discriminant validity* meggunakan *Average Variance Extracted* (AVE). adapun parameter *cross loading* dalam menilai nilai *average variance extracted* untuk mengetahui tingkat validitas dari masing-masing indiaktor konstruk pada setiap variable direkomendasikan lebih besar dari 0,50 ( $> 0,50$ ) (Ghozali dan Latan, 2012: 75). Hasil analisis *discriminant validity* dapat dikemukakan pada table di bawah ini :

**Tabel 4.19**  
**Discriminante Validity Pada Avarage Extracted (AVE)**

Variabel	Nilai
Informasi tentang pentahelix system	0.383
Berkolaborasi dengan unsur-unsur pentahelix system	0.210
Faktor pengetahuan	0.531
Faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system	0.536

*Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS*

Berdasarkan hasil running data Tabel di atas. Memperlihatkan nilai *average variance extracted* pada masing-masing variable variabel faktor pengetahuan , telah memenuhi kriteria dalam *discriminant validity*, hal ini dinilai dari *average variance extracted* (AVE) yang lebih besar dari pada 0,50 ( $> 0,50$ ). Namun pada variabel informasi tentang pentahelix system dan variable berkolaborasi dengan unsur-unsur pentahelix system tidak memenuhi kriteria dalam *discriminant validity*, hal ini dinilai dari *average variance extracted* (AVE) yang lebih kecil dari pada 0,50 ( $< 0,50$ ).

### 4.3.2.3. Composite Reliability

Dalam melakukan uji reliabilitas yang bertujuan untuk membuktikan seberapa akurat, konsistensi dan ketepatan instrument didalam mengukur suatu konstruk. Penggunaan *composite reliability* bertujuan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk (Ghozali dan Latan, 2012: 75). Selain itu, untuk melakukan penilaian terhadap *composite reliability* melalui *rule of thumb*, dimana nilai *composite reliability* harus lebih besar dari 0,70 ( $> 0,70$ ). Dalam menguji nilai reliabilitas pada setiap konstruk dapat dilakukan dengan menggunakan *Cronbach's Alpha*, ketentuan dari penilaian ini dilakukan melalui *rule of thumb*, dimana nilai *Cronbach's Alpha* harus lebih besar dari 0,70 ( $> 0,70$ ). Hasil dari analisis data memperlihatkan sebagai berikut :

**Tabel 4.20**  
**Composite Reliability**

Variabel	Nilai	Keterangan
Informasi tentang pentahelix system	0.707	Reliabel
Berkolaborasi dengan unsur-unsur pentahelix system	0.510	Reliabel
Faktor pengetahuan	0.845	Reliabel
Faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system	0.809	Reliabel

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa nilai *composite reliability* pada variabel informasi tentang pentahelix system, faktor pengetahuan, masing-masing menunjukkan nilai sebesar 0,707 ; 0,845; Seluruh nilai *reliability construct*  $> 0,70$ . Namun variabel berkolaborasi dengan unsur-unsur pentahelix system menunjukkan nilai sebesar 0.510, maka nilai *reliability construct*  $< 0,70$ . Maka dalam hal ini keberadaan variabel memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

### Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Dalam Pengujian pada model strukturan (*inner model*) bertujuan untuk melihat hubungan antara variable. Pengukuran dilakukan dengan melihat nilai R-Square yang nantinya dapat diketahui tingkat variance terhadap perubahan variable independent

terhadap variable dependent. Hasil analisis R-Square ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.21**  
**R-Square**

	R-Square
Faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system	0.701

*Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS*

Berdasarkan Tabel diatas yang memperlihatkan nilai *R-Square* pada variable faktor pemerintahan desa terhadap pentaheix system sebesar 0,701. Maka dapat dijelaskan bahwa varian pada variable informasi tentang pentahelix system, berkolaborasi dengan unsur-unsur pentahelix system, faktor pengetahuan, mampu menjelaskan variabel faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system sebesar 0,701 atau sebesar 70,1%.

#### Pengujian Hipotesis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SEM-PLS dalam uji hipotesis, maka dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.22**  
**Uji Hipotesis**

	Original Sampel	T-Statistic	P Values	Keputusa
X1-Y	0.446	0.149	0.882	H0 diterima
X2-Y	0.583	0.351	0.725	H0 diterima
X3-Y	0.456	0.282	0.778	H0 diterima

*Sumber :Data Hasil Pengolahan PLS*

Tabel 4.22 dapat dijelaskan bahwa ketentuan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai original sample sebagai nilai coefficient atau disebut juga nilai beta. Dalam menetapkan penerimaan atau penolakan pada H0 dalam pengujian hipotesis, dapat dilihat dari nilai pada kolom T Statistic dan nilai pada kolom P Values. Adapun ketentuannya adalah jika nilai t statistic lebih besar dari nilai t

table ( $t \text{ statistic} > t \text{ tabel}$ ) pada taraf signifikansi 10 % ( $t \text{ tabel}$  dilihat dari jumlah sampel, dimana sampel pada penelitian ini berjumlah 15 orang) atau menggunakan nilai P Value dengan ketentuan jika  $<0,10$ , dimana kesimpulannya tolak  $H_0$ , dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan, begitu juga sebaliknya.

### **Hasil analisis data :**

#### **1. Pengaruh Informasi Tentang Pentahelix System Terhadap Faktor Pemerintahan Desa Terhadap Pentahelix System ( $X_1 \rightarrow Y$ )**

Hasil uji hipotesis informasi tentang pentahelix system memiliki pengaruh terhadap faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system berdasarkan tabel 4. 22 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai  $t \text{ statistic}$  sebesar 0.149, sementara nilai  $t \text{ tabel}$  pada taraf signifikan 0,10% diperoleh sebesar 1,753 berdasarkan jumlah sampel sebesar 15 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa  $t \text{ statistic} > t \text{ tabel}$  ( $0,149 > 1,753$ ), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan P Value, dengan ketentuan  $p < 0,10$ , berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai  $0.882 > 0.10$ . Ketentuannya  $H_0$  diterima, maka disimpulkan bahwa informasi tentang pentahelix system tidak berpengaruh positif terhadap faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system..

#### **2. Pengaruh Berkolaborasi Dengan Unsur-Unsur Pentahelix System Terhadap Faktor Pemerintahan Desa Terhadap Pentahelix System ( $X_2 \rightarrow Y$ )**

Hasil uji hipotesis berkolaborasi dengan unsur-unsur pentahelix system memiliki pengaruh terhadap faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system berdasarkan tabel 4.22 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai  $t \text{ statistic}$  sebesar 0.351, sementara nilai  $t \text{ tabel}$  pada taraf signifikan 10% diperoleh sebesar 1.753 berdasarkan jumlah sampel sebesar 15 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa  $t \text{ statistic} < t \text{ tabel}$  ( $0.351 <$

1.753), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan P Value, dengan ketentuan  $p < 0.10$ , berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai  $0.725 > 0.10$ . Ketentuannya  $H_0$  diterima, maka disimpulkan berkolaborasi dengan unsur-unsur pentahelix system tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system.

### **3. Pengaruh Faktor Pengetahuan Terhadap Faktor Pemerintahan Desa Terhadap Pentahelix System ( $X_3 \rightarrow Y$ )**

Hasil uji hipotesis Faktor Pengetahuan memiliki pengaruh terhadap faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system berdasarkan tabel 4.22 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai t statistic sebesar 0,282 sementara nilai t tabel pada taraf signifikan 10% diperoleh sebesar 1.753 berdasarkan jumlah sampel sebesar 15 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa t statistic  $<$  t tabel ( $0.282 < 1.753$ ), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan P Value, dengan ketentuan  $p < 0.10$ , berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai  $0.778 > 0.10$ . Ketentuannya  $H_0$  diterima, maka disimpulkan faktor pengetahuan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap faktor pemerintah desa terhadap pentahelix system.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis informasi tentang pentahelix system memiliki pengaruh terhadap faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system berdasarkan tabel 4. 22 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai t statistic sebesar 0.149, sementara nilai t tabel pada taraf signifikan 0,10% diperoleh sebesar 1,753 berdasarkan jumlah sampel sebesar 15 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa t statistic > t tabel ( $0,149 > 1,753$ ), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan P Value, dengan ketentuan  $p < 0,10$ , berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai  $0.882 > 0.10$ . Ketentuannya  $H_0$  diterima, maka disimpulkan bahwa informasi tentang pentahelix system tidak berpengaruh positif terhadap faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system.
2. Hasil uji hipotesis berkolaborasi dengan unsur-unsur pentahelix system memiliki pengaruh terhadap faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system berdasarkan tabel 4.22 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai t statistic sebesar 0.351, sementara nilai t tabel pada taraf signifikan 10% diperoleh sebesar 1.753 berdasarkan jumlah sampel sebesar 15 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa t statistic < t tabel ( $0.351 < 1.753$ ), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan P Value, dengan ketentuan  $p < 0.10$ , berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai  $0.725 > 0.10$ . Ketentuannya  $H_0$  diterima, maka disimpulkan berkolaborasi dengan unsur-unsur pentahelix system tidak

3. berpengaruh positif dan signifikan terhadap faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system.
4. Hasil uji hipotesis Faktor Pengetahuan memiliki pengaruh terhadap faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system berdasarkan tabel 4.22 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai t statistic sebesar 0,282 sementara nilai t tabel pada taraf signifikan 10% diperoleh sebesar 1.753 berdasarkan jumlah sampel sebesar 15 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa  $t \text{ statistic} < t \text{ tabel}$  ( $0.282 < 1.753$ ), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan P Value, dengan ketentuan  $p < 0.10$ , berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai  $0.778 > 0.10$ . Ketentuannya  $H_0$  diterima, maka disimpulkan faktor pengetahuan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap faktor pemerintahan desa terhadap pentahelix system.
5. Kabupaten Asahan dengan jumlah PDRB sebesar Rp.41.994 milyar yang didominasi oleh Tiga lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB Kabupaten Asahan pada tahun 2021 yaitu: pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 15.920.46 milyar, industri pengilangan sebesar 9.681.56 milyar, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8.175.11 milyar.
6. Kabupaten Batu Bara dengan jumlah PDRB sebesar Rp.37.198 milyar yang didominasi oleh Tiga lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB Kabupaten Batu Bara pada tahun 2021 yaitu: industri pengolahan sebesar 17.007.75 milyar, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 7.533.00 milyar, dan perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6.653.31 milyar

7. jumlah penduduk miskin di wilayah pantai timur provinsi sumatera utara tahun 2021 sebesar 1 343.86 jiwa terhadap total penduduk wilayah pantai timur provinsi sumatera utara. Jumlah penduduk miskin terbesar berada pada Kabupaten deli serdang tapi setiap tahun penduduk miskin menurun tahun 2017 sebesar 97.09 dan pada tahun 2021 makin sedikit sebanyak 92.52 jiwa. diikuti dengan Kabupaten asahan pada tahun 2017 sebanyak 83.67 jiwa dan pada tahun 2021 makin sedikit sebanyak 69.29 jiwa, dan Kabupaten batu bara sebanyak 50.91 jiwa pada tahun 2017 tetapi adanya naik turun disetiap tahun, meningkat pada tahun 2021 sebanyak 52.59 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten serdang bedagai sebesar 56.93 jiwa pada tahun 2017 sedangkan pada tahun 2018,2019,2020 menurun tetapi naik kembali pada tahun 2021 sebanyak 51.16 jiwa.
8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah pantai timur provinsi sumatera utara terus mengalami kemajuan selama periode 2017 sampai 2021. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Asahan meningkat signifikan dari 64.10 pada tahun 2017 menjadi 70.49 pada tahun 2021. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi berada pada Kabupaten deli serdang sebesar 75.53. IPM Sematera utara menunjukkan kemajuan yang besar. indeks Pembangunan manusia Sumater utara masih berstatus “sedang”. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah pada Tahun 2020 di 4 kabupaten wilayah pantai timur provinsi sumatera utara berada pada Kabupaten Batu Bara sebesar 68,58.

## 5.2. Saran

1. Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan dan tata cara pengelolaan dana desa kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai
2. Pemerintah desa perlu berkolaborasi dengan unsur-unsur pentahelix system dengan lima unsur yaitu Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan media agar mempengaruhi pentingnya pentahelix system dalam rangka pengelolaan dana desa
3. Pemerintah harus mengembangkan potensi di wilayah pantai timur provinsi Sumatera Utara melalui sektor pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan cara mengembangkan nilai-nilai budaya, kerajinan tangan, dan kuliner sehingga wisatawan yang datang berkunjung tidak hanya melihat pesirnya saja

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhyi, Herwan, (2017) *The Penta Helix Collaboration model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City*.
- Andhiani, K.D., Erfit & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Volume 7, halaman 1-34*.
- Arifianto, W., & Setiyono, I. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Unesa, 2-16*.
- Arsyad, L. (2005). *pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. yogyakarta: BPFE-UGM*.
- Azwardi, & Abukosim. (2007). Pengelolaan Keuangan Pedesaan Dalam Mendorong Pembangunan Wilayah Pedesaan: Suatu Tinjauan Teoritis. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 5*.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *pertumbuhan ekonomi indonesia triwulan IV 2021*
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2021. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2010-2021. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Perkembangan Tingkat Kemiskinan, 2021*
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Perkembangan Gini Ratio, 2021*
- Carayannis, EG, & Campbell, DFJ (2010). Triple helix, qua druple helix dan quintuple helix dan bagaimana pengetahuan, dalam novasi dan lingkungan berhubungan satu sama lain? *Jurnal*
- Deininge, K. , Dan Pedro, O. (2000). Asset Distribution, Inequality, and Growth. *The World Bank, 5-9*.
- Hermawan, D. (2007). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerataan Kemampuan Keuangan dan Kinerja Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Banten). Institut Pertanian Bogor, 11
- Ishak, P., & Sholehah, N. L. H. (2021). Implementasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan UMKM Dimasa Pandemi Covid-19. *Gorontalo Accounting Journal, 4(2), 207*. <https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1726>
- Jhingan, M. (2000). *ekonomi pembangunan dan perencanaan daerah*. jakarta: PT Rajawali Pers.
- Jhingan, M. (2010). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jhingan. 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Edisi Keenambelas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kuncoro, M. (2004). *otonomi dan pembangunan daerah*. jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Erlangga
- Mankiw, G. N. (2007). *macroeconomics*. jakarta: Erlangga
- Musgrave, R. A., & Peggy, B. (1993). *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek (edisi kelima)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Otonomi Desa. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Rochjadi, A. (2004). *Kajian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah InterGovernmental Fiscal Review*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (2021-2022). *Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa 2022*. <https://setkab.go.id> (dipublikasikan pada 19 Februari 2022).
- Suliswanto, M. S. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Angka kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 8, 357*.
- Suyanto. (2009). *Studi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia (a study on the policy of decentralization in Indonesia)*. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, volume 1, 66-81.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 (Edisi Kesebelas)*. Jakarta: Erlangga

# LAMPIRAN

## KUESIONER PENELITIAN

No. Kuesioner :.....

Hari/Tanggal :.....

Yang terhormat,

Bapak/Ibu Responden

Saya Rizana Rizki Amalia Nasution, mahasiswa program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sedang melakukan penelitian mengenai **ANALISIS KONSEP SDGS DAN DANA DESA DALAM PENTAHALIX SYSTEM UNTUK MEMPERBARUHI PEKEMBANGAN EKONOMI DI WILAYAH PANTAI TIMUR PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS : KABUPATEN ASAHAN DAN KABUPATEN BATU BARA)**

Kuesioner ini semata-mata bagian dari Tugas Akhir yang saya kerjakan. Anda merupakan responden yang tepat, sehingga saya sangat mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu dengan mengisi kuesioner penelitian ini dan memberikan jawaban atas pertanyaan maupun pernyataan yang diajukan secara lengkap dan benar. Saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan dan partisipasi Bapak/Ibu dalam penelitian ini.

### I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama :.....

2. Usia :..... Tahun

4. Jenis kelamin :  Laki-Laki  Perempuan

5. Jabatan :.....

**Petunjuk pengisian :**

Isilah jawaban sesuai pendapat anda dengan memberikan tingkat penilaian dengan tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia.

**Keterangan untuk skala Penilaian :**

**1 = STS : Sangat Tidak Setuju**

**2 = TS : Tidak Setuju**

**3 = S : Setuju**

**4 = CS : Cukup Setuju**

**4 = SS : Sangat Setuju**

**II. INFORMASI TENTANG PENTAHHELIX SYSTEM**

NO	PERNYATAAN	1	2	3	4	5
		STS	TS	S	CS	SS
1	Saya mengetahui tentang pentahelix system					
2	Saya mengetahui manfaat adanya kolaborasi pentahelix system					
3	Saya mengetahui tujuan dari adanya pentahelix system					
4	Adanya kolaborasi dengan pentahelix system untuk mengembangkan program dengan melibatkan 5 unsur yaitu pemerintah, bisnis, kounitas, akademisi, media					

**III. BERKOLABORASI DENGAN UNSUR-UNSUR PENTAHHELIX SYSTEM**

NO	PERNYATAAN	1	2	3	4	5
		STS	TS	S	CS	SS
5	Menjadi salah satu referensi pengembangan penelitian terkait topik pengembangan desa dan kolaborasi akademisi					

6	Berkolaborasi dengan akademisi menjadi landasan pelaksanaan program pengabdian masyarakat dan magang peserta didik					
7	menjadi referensi pengembangan kurikulum pengajaran terkait sektor pariwisata dan ekonomi kreatif					
8	bisnis memberikan strategi marketing untuk perkembangan desa					
9	bisnis mendorong produk kreatif unggulan dari desa untuk menjangkau pasar nasional dan global					
10	upaya strategi komunitas berbasis kearifan lokal					
11	berpengaruh kolaborasi pentahelix dengan unsur kerja sama tim					
12	pentahelix sytem berpengaruh dengan pemerintah desa					
13	efektif atau tidak berkerja sama / berkolaborasi dengan pentahelix system					
14	Memanfaatkan platfrom digital untuk memasarkan produk ekonomi kreatif desa					

#### IV. FAKTOR PENGETAHUAN

NO	PERNYATAAN	1	2	3	4	5
		STS	TS	S	CS	SS
15	Proses perencanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, indeks pembangunan desa, dan unsur masyarakat secara partisipasif guna memanfaatkan dan mengalokasikan desa dalam rangka mencapai tujuan pembanunan desa dengan berkolaborasi pentahelix ssystem					
16	Memberikan gambaran penting membentuk pembangunan desa kreatif					
17	Pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal					
18	Adanya peningkatan pendapatan masyarakat dari usaha kreatif					
19	Peningkatan adanya pengunjung desa kreatif					

## V. Faktor Pemerintahan Desa Terhadap Pentahelix System

NO	PERNYATAAN	1	2	3	4	5
		STS	TS	S	CS	SS
20	Pemerintah harus memiliki target untuk mengembangkan faktor pentahelix system					
21	Semakin banyak jumlah yang berkolaborasi dengan pentahelix system maka pemerintahan desa semakin berkembang					
22	Pemerintah desa berperan penting dalam pencapaian kolaborasi dengan pentahelix system					
23	Semakin banyak yang berkolaborasi dengan pentahelix maka semakin meningkat perekonomian desa					

## Jawaban Kuesioner Variabel Informasi Tentang Pentahelix System

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4
1	1	3	3	1
2	1	1	5	2
3	1	1	1	1
4	1	2	5	1
5	2	2	3	2
6	1	1	2	1
7	1	1	1	1
8	1	1	1	2
9	1	1	1	1
10	1	1	1	1
11	2	1	1	1
12	1	1	1	2
13	1	1	1	1
14	1	1	1	1
15	1	1	1	1

**Jawaban Kuesioner Variabel Berkolaborasi dengan unsur-unsur Pentahelix System**

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10
1	2	2	4	5	5	5	3	5	3	5
2	4	5	5	5	5	5	5	2	3	5
3	5	4	3	5	5	3	5	5	4	5
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	5	5	5	5	5	3	3
6	4	3	4	5	3	4	3	5	3	4
7	4	5	5	4	3	4	1	5	5	5
8	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5
9	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4
10	3	4	1	1	3	1	5	3	5	5
11	3	2	3	5	5	5	5	2	3	5
12	5	4	4	5	5	5	5	1	3	5
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
15	3	2	2	4	3	3	4	3	3	3

**Jawaban Kuesioner Variabel Faktor Pengtahuan**

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
1	5	5	3	4	5
2	3	5	4	5	5
3	2	5	5	5	5
4	4	5	4	3	5
5	1	4	2	4	3
6	3	3	5	5	5
7	2	3	2	4	4
8	4	4	5	4	5
9	3	3	5	5	3
10	2	2	3	4	4
11	2	5	5	5	5
12	3	5	5	5	5
13	3	3	3	3	3
14	3	3	3	3	3
15	5	5	5	5	5

**Jawaban Kuesioner Variabel Faktor Pemerintahan Desa Terhadap Pentahelix System**

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4
1	5	5	1	5
2	5	5	4	5
3	5	5	5	5
4	5	5	5	5
5	1	4	4	5
6	4	5	4	5
7	5	5	5	5
8	5	5	5	5
9	5	5	5	5
10	5	5	5	5
11	5	5	5	5
12	5	5	5	5
13	5	5	5	5
14	4	4	4	4
15	5	5	5	5



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6624567, Kode Pos Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

NAMA MAHASISWA : RIZANA RIZKI AMALIA NASUTION  
NPM : 1805180016  
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN  
KONSENTRASI : RISET EKONOMI DAN BISNIS  
JUDUL PROPOSAL : ANALISA KONSEP SDGs DAN DANA DESA DALAM PENTAHHELIX SYSTEM UNTUK MEMPENGAUHI PEMBANGUNAN EKONOMI DIWILAYAH PANTAI TIMUR SUMATERA UTARA (STUDI KASUS : KABUPATEN ASAHAN DAN KABUPATEN BATU BARA )

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
12/04/2022	Bab I nya hrs dirinci & mebuat dosen mengapa judul ini dipilih peneliti dgn pant. Pentahelix System di Pantai Timur		
22/04/2022	Bab I - rumusan masalah hrs lebih up to date dan tujuan peneliti jadi lebih tepat		
19/05/2022	Bab II hrs akur seucukan dgn rumus metode dan tujuan, dan grand theory hrs dicantol dan Text books - Pnkn. kndatun hrs tepat dgn rumus - Nyulun		
24/05/2022	Bab III hrs disesuaikan dgn tujuan penelitian yg sdh di rumuskan, tapi hrs ada kbar-bda		
31/5-2022	All in Bab I, II dan III sdh hrs dirinci hrs sesuai dgn rumus dan Acc & direvisi!!		

Medan, ... 4 Jun ... 2022

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Ekonomi  
Pembangunan

Pembimbing

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL**

Pada hari ini 21 Juni 2022 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan  
menerangkan bahwa :

Nama : Rizana Rizki Amalia Nasution  
N.P.M. : 1805180016  
Tempat / Tgl.Lahir : Rambung Sialang, 05 juli 2000  
Alamat Rumah : Jl.ampera VII no 2  
JudulProposal : Analisa konsep SDGs dan dana desa dalam pentahelix system untuk  
mempengaruhi perkembangan ekonomi di wilayah pantai timur Sumatera  
Utara (studi kasus : kabupaten Asahan dan kabupaten Batu bata)

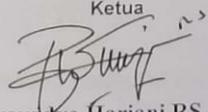
Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	✓
Bab I	tabel, gambar dan grafik disesuaikan, menyederukan rumusan dan tujuan
Bab II	Peneliti Lebih
Bab III	tambahkan sumber defmisi operasional, analisis yg.
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

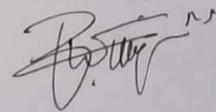
Medan, 21 Juni 2022

**TIM SEMINAR**

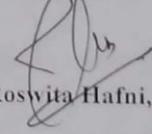
Ketua

  
Dr. Prawidya Hariyani RS, SE., M.Si.

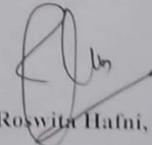
Pembimbing

  
Dr. Prawidya Hariyani RS, S.E., M.Si.

Sekretaris

  
Dra. Hj. Roswita Hafni, M.Si.

Pembanding

  
Dra. Hj. Roswita Hafni, M.Si.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext. 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari *Selasa 21 Juni 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Rizana Rizki Amalia Nasution  
N .P.M. : 1805180016  
Tempat / Tgl.Lahir : Rambung Sialang, 05 juli 2000  
Alamat Rumah : Jl.ampera VII no 2  
JudulProposal :Analisa konsep SDGs dan dana desa dalam pentahelix system untuk mempengaruhi perkembangan ekonomi di wilayah pantai timur Sumatera Utara (studi kasus : kabupaten Asahan dan kabupaten Batu bata)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *Dr. Prawidya Hariyani RS, S.E,M.Si*

Medan, 21 Juni 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariyani RS,SE.,M.Si.

Pembimbing

Dr. Prawidya Hariyani RS, S.E,M.Si

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pemanding

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Diketahui / Disetujui  
A.n. Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc.Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 2333/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/15/3/2022

Kepada Yth.  
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 15/3/2022

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rizana Rizki Amalia Nasution  
NPM : 1805180016  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Riset Ekonomi Dan Bisnis

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : fokus kebijakan dana desa hanya di angap untuk pembangun infrastruktur di pedesaan, akan tetapi bukan befokus tentang masalah kualitas sumber daya manusia

Rencana Judul : 

1. Kebijakan Dana Desa Dan Pentahelix Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi Di Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara
2. Analisis Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produksi Dan Harga Pangan Yang Menjadi Pemicu Inflasi Di Indonesia
3. Analisis Nilai Ekonomi Pendapatan Usaha Tangkap Nelayan Dalam Penunjang Kegiatan Objek Wisatawan Di Wilayah Pantai Cermin

Objek/Lokasi Penelitian : Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Rizana Rizki Amalia Nasution)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 2333/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/15/3/2022

Nama Mahasiswa : Rizana Rizki Amalia Nasution

NPM : 1805180016

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Riset Ekonomi Dan Bisnis

Tanggal Pengajuan Judul : 15/3/2022

Nama Dosen Pembimbing<sup>\*)</sup> :

Prawidya H RS

Judul Disetujui<sup>\*\*)</sup> :

kebijakan Dana Desa dan pentahelix mempengaruhi  
Pembangunan Ekonomi di wilayah pantai Timur  
sumatera Utara.

Medan, .....

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Dosen Pembimbing

(Dr. PRAWIDYA HARLANI<sup>RS</sup>.E., M.Si)

Keterangan:

\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAH-PT/Akred/PT/II/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 2467 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2022**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :  
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**  
Pada Tanggal : **8/22/2022**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :  
Nama : **Rizana Rizki Amalia Nasution**  
N P M : **1805180016**  
Semester : **VIII (Delapan)**  
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**  
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Konsep SDGs Dan Dana Desa Dalam Pentahelix System  
Untuk Mempengaruhi Perkembangan Ekonomi Di Wilayah Pantai  
Timur Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Kabupaten Asahan  
Dan Kabupaten Batubara)**

Dosen Pembimbing : **Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 22 Agustus 2023**
4. Revisi Judul.....

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 24 Muharram 1444 H  
22 Agustus 2022 M



Dekan

**H. JANURI, SE.,MM.,M.Si.**  
N I D N : 0 1 0 9 0 8 6 5 0 2

Tembusan :  
1. Pertinggal



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

Nama : Rizana Rizki Amalia Nasution  
NPM : 1805180016  
Tempat dan Tanggal Lahir : Rambung Sialang, 05 juli 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak Ke : 1 (pertama) dari 2 (dua) bersaudara  
Alamat : Jl. Ampera VII No, 2  
No. Telepon : 082211413635  
Email : rizananasution22@gmail.com

### 2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Syahrizal Nasution  
Nama Ibu : Inna Handayani  
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta  
Pekerjaan Ibu : Ibu rumah Tangga  
Alamat : Desa Pergulaan Dsn III, pekan Kamis  
Kec. Sei Rampah

### 3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

1. Tahun 2005-2011 : SD N 101888
2. Tahun 2011-2014 : SMP N 2 Sei Rampah
3. Tahun 2014-2017 : SMK Awal Karya Pembangunan Galang
4. Tahun 2018, Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan (S-1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 6 September 2022

Rizana Rizki Amalia Nasution